

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT BERBASIS MASYARAKAT
DI KAWASAN TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE
KABUPATEN SELAYAR**

*Community-Based Management of the Marine Resources
Of Taka Bonerate National Park in Selayar Agency*



A Z W A R
P0202204008

**PEMBANGUNAN MASYARAKAT
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT BERBASIS MASYARAKAT
DI KAWASAN TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE
KABUPATEN SELAYAR**

*Community-Based Management of the Marine Resources
Of Taka Bonerate National Park in Selayar Agency*

**Tesis
Sebagai Salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister**

**Program Studi
PEMBANGUNAN MASYARAKAT**

Disusun dan Diajukan oleh

A Z W A R

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

PRAKATA

Segala puji bagi Allah swt, yang telah menciptakan manusia dengan akal sehingga menjadi makhluk yang sempurna. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap ada pada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai akhir zaman.

Studi ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan mengenai pengelolaan sumber daya laut di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Sehingga dapat memberikan masukan kepada publik untuk memikirkan solusi kedepan.

Penyelesaian tugas akhir (tesis) ini tak lepas dari peran aktif berbagai pihak yang memberikan bantuan materi, moril dan bimbingan. Kepada beliau-beliau yang telah memberikan pikiran, ilmu dan meluangkan waktu maka penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta MASYKUR. R yang telah memberikan motivasi dalam studiku. Ibunda terkasih KASMAWATI yang menjadi semangat hidupku dan menerangiku dengan doa, kakakku yang Nurnaningsih, Sukmawan yang selalu menjadi panutan, serta adikku Cahyani dan Masnawati.
2. Dr. Ir. Yusran Nur Indar, M.Phil selaku pembimbing pertama yang rela meluangkan waktu dan atas kesabaran untuk membimbing dalam penyusunan tesis ini serta keilmuan yang diajarkan kepada penulis.
3. Drs. Mansur Radjab, M.Si selaku pembimbing kedua atas segala pengertian, kebijaksanaan serta arahan dalam penyusunan tesis ini.

4. Ketua Program Studi Konsentrasi Pembangunan Masyarakat dan para dosen atas bimbingan dan wawasan Pembangunan Masyarakat yang telah diberikan dan suasana keilmuan yang tercipta.
5. Pihak Beasiswa Program Pascasarjana yang memberikan bantuan dana dalam pelaksanaan studi penulis.
6. Masyarakat Pulau Rajuni yang telah menerima saya dan segala informasinya.
7. Rekan-rekan se-angkatan 2004 Kak Pai, Kak Mahbub, Kak Ichsan, Kak Tiar, Kak Ay dan Kak Lukman yang telah berbagi ilmu dan rasa, kebersamaan kita menambah warna dalam hidupku.
8. My heni Ningsih yang penuh kesabaran dan kesetiaan menemani penulis dalam menjalani studi dan membantu penyusunan tesis ini.
9. Saudara-saudariku di pondokan Rawa Permai yang banyak memberiku gambaran dan motivasi kedewasaan sikapnya, kerabatku di jurusan Antropologi, khususnya angkatan 97.
10. Pihak yang namanya tidak tercantum satu persatu namun telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan tesis ini.

Akhir kata, penulis hanya dapat mendoakan dan mengucapkan *jazakumullahu khaeran* (semoga Allah membalas segala jasa dengan kebaikan) dan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca. Amin

Makassar, April 2007

A Z W A R

ABSTRACT

AZWAR, Community-Based Management of the Marine Resources Of Taka Bonerate National Park in Selayar Agency (supervised by **Yusran Nur Indar** dan **Mansur Radjab**).

The study aims to investigate the problems in the marine resources management of the National Park of *Taka Bonerate* and the management types performance by both the local and the visiting fishermen.

The study is conducted in the National Park area of *Taka Bonerate* particularly in Rajuni Island. The island is located in the middle of the national park. The methods used to collect data needed for the study are interviews, observations, and documents examinations. The data are analyzed and qualitatively.

He result indicates that the marine resources management is crucial and needs more serious attention from various stakeholders : government, NGOs, and local community-based management of the marine resource will have social and economic impacts on the people and some consequences on the environment.

ABSTRAK

AZWAR, *Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Selayar* (dibimbing oleh Yusran Nur Indar dan Mansur Radjab).

Penelitian ini bertujuan menjelaskan permasalahan pengelolaan sumber daya laut di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate dan bentuk pengelolaan sumber daya laut oleh nelayan lokal dan pendatang.

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate (Khususnya Pulau Rajuni). Pulau Rajuni merupakan pulau yang terletak ditengah-tengah Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan telaah dokumen serta pengolahan data dan dianalisa secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya laut perlu perhatian lebih serius dari berbagai kalangan. Seperti Pemerintah, NGO, dan Lembaga Masyarakat lokal. Bentuk pengelolaan sumber daya laut di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate dilakukan oleh nelayan lokal dan nelayan pendatang. Dampak pengelolaan sumber daya laut ini berakibat pada lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat.

DAFTAR RALAT

No	Halaman	Ralat	Harusnya
1.	iii	Marine Resource Management Based Community in Taka Bonerate National Park Area Kabupaten Selayar	Community-Based Management of the Marine Resources Of Taka Bonerate National Park in Selayar Agency

DAFTAR TABEL

1.	Table 1 : Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin.....	53
2.	Tabel 2 : Jenis Pekerjaan Di KTNB.....	54
3.	Tabel 3 : Tingkat Pendidikan Penduduk di KTNB.....	56
4.	Tabel 4 : Nama-Nama Pulau dan Makananya.....	62

DAFTAR STRUKTUR

1. Struktur Kerangka Pikir..... 42
2. Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Taka Bonerate 65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perikanan dan kelautan merupakan potensi sumber daya di Indonesia. Potensi ini diantaranya potensi hayati dan non hayati. Potensi hayati misalnya perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Potensi non hayati misalnya mineral, bahan tambang dan pariwisata. Semua itu merupakan potensi yang perlu dikembangkan demi kelangsungan ekosistem dan kemakmuran penduduk yang mengelolanya.

Sumber daya yang ada perlu dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga mampu mengangkat masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan. Sumber daya alam dengan sumber daya manusia yang tidak seimbang menjadi masalah utama. Sumber daya manusia yang ada di sekitar sumber daya alam, memerlukan pembinaan dan pendidikan yang berkelanjutan. Pada dasarnya mereka mempunyai pengetahuan secara lokal (budaya) yaitu, Budaya mereka mengenai pengelolaan sumber daya laut secara tradisional yang berbeda-beda pada setiap komunitas.

Maka keikutsertaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam sangat penting. Sebab, walaupun masyarakat kurang dari segi perencanaan program namun mereka dapat memahami bagaimana mengelola sumber daya alam secara sosial budaya yang ramah lingkungan, juga memiliki akar budaya yang kuat tergabung dalam sebuah kepercayaan

(*religion*). Sistem pengelolaan masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan sumber daya alamnya. Masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, bentuk, dan tujuan aspirasinya serta mereka sendiri yang membuat keputusan demi kesejahteraan melalui sebuah pembangunan masyarakat.

Melihat realitas sumber daya alam laut di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate maka dibutuhkan pengelolaan secara berkelanjutan dan menjadi terminologi kegiatan masyarakat dalam mengelola ruang, sumber daya, atau mengelola sumber daya yang terdapat dalam wilayah laut. Pengelolaan di fokuskan pada pemanfaatan sumber daya laut dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate dengan melakukan penilaian secara menyeluruh. Dalam rangkai pengelolaan diperlukan perencanaan untuk berkoordinasi dan mengarahkan berbagai aktivitas dari berbagai sektor pembangunan. Perencanaan yang dimaksud sebagai suatu upayah secara terprogram untuk mencapai tujuan yang dapat mengharmonisasikan dan mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara lingkungan, keterlibatan masyarakat dan pembangunan ekonomi masyarakat.

Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate merupakan sumber daya alam yang memiliki terumbu karang terluas di Indonesia dan terluas ketiga di dunia yang berada di Laut Flores Kabupaten Selayar. Persoalan yang dihadapi oleh komunitas Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate adalah

pengelolaan yang berbentuk eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan. Kondisi penduduk yang semakin bertambah dan bertambah miskin, dan minimnya pengetahuan modern untuk pengelolaan sumber daya yang ekonomis dan ramah lingkungan.

Potensi sumber daya laut seperti terumbu karang (*coral reef*) merupakan kekayaan laut tropis yang mengandung banyak potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat. Ekosistem terumbu karang dikenal sebagai daerah yang subur karena memiliki biota laut yang melimpah dengan produktivitas yang tinggi. Komponen biota terpenting terumbu karang ialah hewan karang batu. Disamping itu sangat banyak jenis biota lainnya yang hidup mempunyai kaitan erat dengan karang batu. Kesemuanya terjadi dalam hubungan fungsional yang harmonis dalam suatu ekosistem yang dikenal sebagai terumbu karang.

Sumber daya hayati terumbu karang dapat pula menghasilkan berbagai produk yang bernilai ekonomis seperti karang, udang, karang alga, teripang, karang mutiara, dan sebagainya dengan memfokuskan terumbu karang dalam beberapa manfaatnya. Potensi sumber daya alam (laut) di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate berupa terumbu karang. Antara lain terumbu karang panata (*fringing reef*) yang terdapat sepanjang pantai dan mencapai kedalaman 40 meter. Terumbu karang penghalang (*barrier reef*) berada jauh dari pantai (biasa puluhan atau ratusan kilometer) dipisahkan oleh goba yan

berada pada kedalaman 40-75 meter. Atol merupakan terumbu karang yang bentuknya melingkar mirip cincing mengitari globa yang dalamnya 40 -100 meter. Terumbu karang mempunyai fungsi disamping rumah ikan juga sebagai obat untuk penyakit kanker apabila sudah dicampur bahan kimia. Terumbu karang juga memiliki arti penting bagi ekosistem perairan. Kerusakan terumbu karang tidak hanya mengakibatkan turunnya produktivitas tetapi juga mengurangi populasi organisme air serta dapat terjadi abrasi pantai.

Berlandaskan pada perspektif ekologi yang kritis sementara dapat disimpulkan bahwa telah terjadi antara lain : (1). Kemerosotan stok sumber daya alam yang diakibatkan oleh penangkapan berlebihan, ini sekaligus menunjukkan gejala ketidakseimbangan antara kondisi sumberdaya dengan tingkat populasi penduduk yang memanfaatkannya. (2). Gejala kerusakan lingkungan ekosistem laut, khususnya ekosistem mangrove dan terumbu karang. (3). Lokasi-lokasi dimana berlangsung aktivitas eksploitasi sumber daya seperti fenomena ekosistem tertutup malaikan lingkungan terbuka bagi pengguna sumber daya dari berbagai tempat asal, etnis, dan kategori sosial, dan (4). Ketimpangan sosial ekonomi berkenaan dengan alokasi pemanfaatan sumber daya diantara individu atau kelompok nelayan.

Fakta membuktikan bahwa kurang atau tidak berfungsinya lagi suatu ekosistem, nilai-nilai dasar atau suatu institusi pada tingkat populasi desa, komuniti pulau-pulau dan pesisir, kelompok sosial berbeda-beda, yang

diasumsikan sebagai mekanisme regulasi pemanfaatan sumber daya alam secara merata, berkelanjutan dan lestari. Menjadi relevan mempertanyakan, bahwa nilai-nilai berorientasi konservasi yang menyebar luas dan dipertahankan oleh kelompok etnis atau kelompok sosia ekonomi tertentu sebetulnya lebih banyak merupakan ideal atau mite/dogma semata daripada nyata dalam praktek. Jika pada kelompok etnik atau sub-etnik tertentu pada suatu waktu tertentu pandangan dan praktek konservasi (dalam artian pemanfaatan secara berkelanjutan/lestari) tinggal terwujud sebagai sisa-sisa kearifan lingkungan atau pengetahuan indigen yang sedang terkikis, lalu faktor apa secara signifikan menyebabkan demikian ?. Apakah pernah atau masih ada suatu sistem tradisional yang bias menceritakan kepada kita adanya praktek pemanfaatan sumber daya berkelanjutan dan lestari.

Pemerintah melakukan tindakan nyata dalam menyelamatkan keadaan tersebut. Dengan membuat Rencana Pengelolaan Taman Laut Nasional Taka Bonerate disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Nasional yang ditetapkan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No : 59/Kpts/Dj-VI/1993. Paradigma Penyusunan Strategi Pengelolaan Taman Laut Nasional Taka Bonerate berdasarkan pada fenomena-fenomena faktual yang digali melalui berbagai penelitian dan survey lapangan.

Selain itu, meskipun belum cukup banyak data akurat, namun terdapat petunjuk bahwa kebijaksanaan sub-sektor perikanan dan kelautan telah

mengancam kelestarian sumber daya alam perikanan dan lingkungan ekosistem laut. Kebijakan tersebut sekurang-kurangnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 1996 tentang Penataan Ruang, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karenanya, pengelolaan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate perlu perhatian khusus dari pemerintah, masyarakat, pemerhati lingkungan dan lembaga swadaya masyarakat. Tanpa melakukan pengelolaan yang tepat akan mengakibatkan resiko yang cukup parah. Untuk mengatasi hal tersebut peran serta dari masyarakat lokal sangat besar, merekalah yang mengetahui dan memanfaatkan sumber daya alamnya dan merasakan manfaatnya secara langsung.

Berbagai upaya dalam merevitalisasi kembali ekosistem yang rusak akibat eksploitasi yang berlebihan berbagai upaya dilakukan oleh para pengambil kebijakan. Termasuk melalui program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang (COREMAP) fase I (Inisiasi) pada tahun 1998-2002. komponen utama pada fase I meliputi pengelolaan program (*management, policy, strategy and legal framework*), kesadaran masyarakat (*Community Based Management*), pemantauan dan survey (*Reserch and Information*), peningkatan kapasitas dan pelatihan (*Capacity Building and Training*).

Kemudian COREMAP pada Fase II lebih kepada pembangunan masyarakat (*Community Development*). Pembangunan Masyarakat yang dipandang sebagai paradigma baru dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Paradigma muncul karena kekurangpuasan dalam pendekatan sebelumnya, yang cenderung *individualistic* dan otoriter yang berbias pada ekonomi pasar. Penggunaan pendekatan berbasis komunitas menggunakan ikatan-ikatan horizontal sebagai pilar utama dan menggunakan kaca mata yang lebih luas (dari sekedar pembangunan ekonomi) dapat dipandang sebagai langkah inovatif dalam pembangunan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Ikatan horizontal dalam suatu komunitas Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate merupakan bagian *sosial capital* yang sangat penting untuk mengembangkan berbagai tindakan kolektif. Salah satu syarat munculnya tindakan kolektif tersebut adalah terbangunnya sesuatu partisipasi, perencanaan sampai evaluasi.

Pembangunan masyarakat seperti diatas selalu diarahkan pada pendekatan partisipatori dengan unsur dan model pembangunan masyarakat menurut Daramawan Salman (2005), Nico.S Kalangi (1994) Syahyuti (2005), Budianto (2006) dan Deddy T. Tikson (2001). Model pembangunan yang berdasarkan kondisi masyarakat sebagai obyek pembangunan. Meskipun dianggap bahwa masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk merumuskan dan membuat perencanaan. Namun, disinilah porsi para ahli melihat kelebihan dari masyarakat untuk merumuskan kebijakan dan perencanaan.

Masyarakat lokal mampu membuat pendefenisian dan memutuskan suatu bentuk program.

Sehingga perlu pengkajian lebih lanjut mengenai sosial ekonomi dan lingkungan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Berbagai aktifitas yang selama ini dihadapkan berbagai masalah dalam masyarakat. Ada beberapa rujukan atau acuan. Seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alder dan Christanty (2005) lebih berfokus pada strategi pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat. Pengelolaan berbasis masyarakat bukanlah solusi atas masalah pemanfaatan sumber daya berkelanjutan, bukan pula suatu program penegakan hukum dengan sendirinya. Penegakan hukum dalam waktu jangka panjang dengan diiringi dengan sistem pendidikan masyarakat. Jadi, perubahan sosial bagi masyarakat nelayan tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, namun memerlukan proses pendidikan dan penyadaran hingga satu generasi dan disatukan dengan program lain untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi penduduk.

Penelitian serupa dilakukan oleh Budianty (2006), masalah studi kasus terkait dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang oleh suatu komunitas nelayan di Pulau Tambolongan, Selayar, Sulawesi Selatan. Komunitas nelayan pulau ini memiliki suatu kawasan terumbu karang di sekitar pulau yang berusaha mereka jaga dengan baik, karena kaya akan sumber daya ikan. Komunitas membuat aturan bahwa penangkapan ikan di kawasan terumbu karang ini hanya bisa dilakukan dengan memancing, dan dilarang

menggunakan bom ikan atau bius ikan. Karena mereka menganggap jika kawasan itu hancur oleh bom dan bius ikan maka tidak ada lagi tempat bagi nelayan Tambolongan mencari ikan di sekitar pulau. Kesepakatan aturan dan sanksi telah ditetapkan oleh komunitas di Dusun Lemba yang terdiri dari sekitar 57 KK (Harian Fajar, 23 Desember 2005). Kegiatan penangkapan ikan dengan bom dan bius ikan berarti melanggar aturan yang telah disepakati, dan harus dicegah.

Tantangan aturan lokal semacam ini biasanya datang dari nelayan yang berasal dari luar komunitas, dan dari ada atau tidaknya pengakuan pemerintah di tingkat regional atau nasional terhadap pengaturan kelembagaan semacam ini. Patut disayangkan jika komunitas yang sudah sedemikian rupa memiliki kesadaran untuk memelihara ekosistem terumbu karang dan membuat aturan dalam pemanfaatannya, terkendala karena pandangan bahwa penetapan aturan dan sanksi merupakan kewenangan pemerintah semata. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah lebih berfokus kepada implementasi dari komuniti secara institusi yang disepakati bersama.

Implementasi terhadap program yang akan dilakukan dalam memanfaatkan sumber daya laut. Kalau sebelumnya melihat bagaimana ancaman dari luar akan pengelolaan sumber daya maka penelitian ini melihat bagaimana penataan sumber daya laut yang akan dikelola. Jadi sangat jelas bahwa tidak mempermasalahkan siapa yang akan memanfaatkan nanti,

namun mereka harus melalui jalur institusi yang dibangun. Institusi yang dibangun harus mematuhi aturan, norma, dan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Kemudian Zulfinas Indra (2006) menekankan pada kelembagaan masyarakat dalam mengelola kawasan pesisir di Taman Nasional Taka Bonerate. Metode yang digunakan dengan melakukan analisis SWOT dalam melihat eksistensi masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir di Taman Nasional Taka Bonerate. Dalam thesis melihat lembaga sosial seperti upacara perkawinan dan *Punggawa-Sawi* dan organisasi lain yang dibentuk secara modern seperti Kelompok Masyarakat (POKMAS) Konservasi, Produksi, Perempuan, Lembaga Kredit Masyarakat (LKM), Lembaga Keuangan Desa (LKD), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Hasil penelitiannya lebih fokus pada pengkajian struktur, aturan, norma yang ada dalam sebuah institusi dan organisasi. Serta keterlibatan masyarakat melalui institusi dan organisasi beserta peran pemerintah.

Yang membedakan dengan penelitian ini adalah lebih berfokus pada pengelolaan sumber daya laut yang berbasis masyarakat. Pengelolaan di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate yang dilakukan oleh sampai pada bagaimana pihak pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah turun tangan. Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan yang ada perlu dikaji seperti nelayan sebagai pelaku utama. Sebab, masyarakat Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate memiliki pekerjaan pokok sebagai nelayan.

Kemudian selain nelayan lokal ada pula nelayan pendatang yang sangat mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan. Selain itu, peran pemerintah sebagai pihak ketiga yang ikut dalam memecahkan masalah.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini memberi pengertian peran serta masyarakat dengan istilah *community based*. *Community based* adalah sebagai peran aktif masyarakat mengembangkan kemandirian dalam pembangunan menuju kehidupan yang sejahtera dan ramah lingkungan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Thesis ini dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keikutsertaan dalam pengelolaan sumber daya laut di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate ?
2. Bagaiman bentuk-bntuk pengelolaan sumber daya laut oleh nelayan lokal dan nelayan pendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan, menjelaskan dan menganalisis dari bentuk dari *community based management* terhadap pengelolaan sumber daya laut di Kawasan Taka Bonerate. Tujuan penelitian ingin menjelaskan permasalahan, antara lain :

1. Bagaiman keikutsertaan dalam pengelolaan sumber daya laut di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.
2. Bagaiman bentuk-bntuk pengelolaan sumber daya laut oleh nelayan lokal dan nelayan pendatang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak terkait dan dapat dijadikan bahan pengkajian selanjutnya. Manfaat lain dari hasil penelitian dapat dijadikan masukan pada pihak pemerintah Kabupaten Selayar dalam merumuskan kembali kebijakan yang perlu diperbaiki mengenai pengelolaan sumber daya laut. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study pada program Pembangunan Masyarakat pada Pascasarjana Unhas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sumber Daya Laut Kawasan Taka Bonerate

1. Terumbu Karang

Karang tergolong dalam jenis makhluk hidup (hewan) yaitu sebagai individu organisme atau komponen dari hewan. Terumbu karang (*coral reefs*) sebagai suatu ekosistem termasuk dalam organisme-organisme karang. Terumbu Karang (*coral reefs*) merupakan organisme yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur (CaCO_3) yang cukup kuat menahan gaya gelombang laut. Selanjutnya menyatakan terumbu karang terbentuk dari endapan-endapan masif kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme karang pembentuk terumbu (karang hermatipik) dari filum Coridaria, ordo Scleractinia yang hidup bersimbiosis dengan zooxantellae dan sedikit tambahan alga berkapur serta organisme lain yang menyeleksi kalsium karbonat. Karang hermatipik (*Hermatypic corals*) yang bersimbiosis dengan alga melaksanakan fotosintesis, sehingga peranan cahaya sinar matahari penting sekali bagi *Hermatypic corals*. *Hermatypic corals* biasanya hidup di perairan pantai/laut yang cukup dangkal di mana penetrasi cahaya matahari masih sampai ke dasar perairan, selain itu untuk hidup lebih baik binatang karang membutuhkan suhu air yang hangat berkisar antara 25-32 °C . (Dawes 1981 dan Bengen D.G. 2001., dalam Budiharsono S. 2001 : 1-2).

Taka Bonerate merupakan kawasan terumbu karang terluas di Indonesia dan terluas ketiga didunia. Terletak dilaut flores di Sulawesi Selatan. Indonesia memiliki kurang lebih 50.000 km² ekosistem terumbu karang yang terbesar diseluruh wilayah pesisir dan lautan (Dahuri, 2001). Terumbu karang mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, pelindung fisik, tempat pemijatan, tempat bermain dan asuhan berbagai biota. Terumbu karang juga menghasilkan berbagai produk yang mempunyai nilai ekonomi penting seperti berbagai jenis hasil perikanan, batu karang untuk konstruksi. Taka Bonerate merupakan contoh persoalan yang dihadapi pengelolaan laut diseluruh dunia; eksploitasi sumber daya berlebihan, kondisi sosial ekonomi dimana semakin banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, minimnya pengelolaan sumber daya laut, pihak ketiga yang saling konflik dan bersaing, silang sengketa yuridiksi dan lemahnya penegakan hukum (Dahuri 2001, Jackei dan Linda 2005 ; 369).

Dari segi estetika, terumbu karang dapat menampilkan pemandangan yang sangat indah. Upaya pemanfaatan sumber daya alam yang lestari dengan melibatkan masyarakat sangat dibutuhkan. Pada kasus di Bali (Dahuri, 2001) dimana masyarakat melakukan pengembalian karang secara intensif harus dicegah dengan mencari alternative berupa pengelolaan wilayah tersebut untuk kepentingan turis dan melibatkan masyarakat didalamnya.

Cara seperti ini telah berhasil dilakukan di Bunakeng Sulawesi Utara dimana masyarakat dilibatkan dalam sektor ekonomi seperti pelayanan pada penjualan souvenir, makanan kecil, dan penyediaan fasilitas pelayanan untuk menikmati terumbu karang, perahu katamar (perahu yang mempunyai kaca pada bagian tengah) atau jasa scuba diving. Sedangkan perusahaan bisa menyediakan fasilitas hotel, restoran dan lain-lain (Latama, 2002 ; 5-6). Ini adalah contoh dan model yang paling tepat untuk dikembangkan sebagai suatu model ekoturisme yang melibatkan komunitas lokal.

Namun kegiatan manusia seperti penambangan karang dengan atau tanpa bahan peledak, pengerukan di sekitar terumbu karang, penangkapan ikan dengan bahan peledak, lalu lintas pelayaran, pertambangan dan lainnya telah menimbulkan masalah besar bagi kerusakan terumbu karang. (Dahuri R.*et al.* 2001).

Akar permasalahan kerusakan terumbu karang meliputi empat hal yaitu (1) Kemiskinan masyarakat dan ketiadaan mata pencaharian alternatif (2) ketidaktahuan dan ketidaksadaran masyarakat dan pengguna (3) lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) dan (4) kebijakan pemerintah yang belum menunjukkan perhatian yang optimal dalam mengelola sistem alami dan kualitas lingkungan kawasan pesisir dan lautan khususnya terumbu karang. (Budiharsono S., 2001 : 1-4).

Permasalahan di atas pengelolaan terumbu karang tersebut maka target penanganannya adalah (1) target sosial, dimana meningkatnya status

kesejahteraan masyarakat dan pengguna, tingkat partisipasi masyarakat dan pengguna dalam kegiatan dan pemanfaatan terumbu karang semakin meningkat, (2) target konservasi ekologi yaitu implementasi dan penegakan peraturan semakin membaik dan gejala *over-exploitation* terumbu karang semakin berkurang, menurunnya sedimentasi yang berasal dari aktivitas di daratan, (3) target ekonomi, yaitu pendapatan masyarakat dan *stakeholders* meningkat, tingkat pengangguran semakin menurun, dan terwujudnya sistem pembagian hasil kegiatan usaha yang semakin adil (4) target kelembagaan, yaitu konflik pemanfaatan ruang antar masyarakat dan *stakeholders* semakin berkurang dan terbentuknya aturan yang dapat difahami, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat dan *stakeholders*. (Budiharsono S., 2001 : 1-3)

2. Potensi Sumber Daya Laut

Menurut hasil penelitian Latama, (2002 ; 6-7) bahwa, Potensi sumberdaya perikanan laut di Indonesia terdiri dari sumber daya perikanan pelagis besar (451.830 ton/tahun) dan pelagis kecil (2.423.000 ton/tahun), sumber perikanan demersal (3.163.630 ton/tahun), udang (100.720 ton/tehun), ikan karang (80.082 ton/pertahun) dan cumi-cumi (328.960 ton/tahun). Data pada tahun 1998 menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan potensi laut baru mencapai 57,0 % dan lahan pertambakan diperkirakan seluas 866.550 Ha dan baru dimanfaatkan seluas 344.759 Ha (39.78 %) bahkan lebih tinggi lagi (Dirjen Perikanan ; 1999 dalam Latama ; 2002). Dengan demikian masih sangat besar peluang untuk memanfaatkan sumber

daya laut dalam peningkatan produksi dan produktivitas lahan. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan produksi yang diatur sehingga bisa mendatangkan keuntungan bagi semua pihak dan pengelolaan yang ramah lingkungan.

Kondisi habitat terumbu karang di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate masih relatif baik jika dibandingkan di wilayah-wilayah di Sulawesi Selatan. Namun sebagian diantaranya telah mengalami kerusakan utamanya terumbu karang yang terletak cukup jauh dari pantai. Atol terdiri dari gugusan pulau-pulau yang jumlahnya cukup banyak.

Ekosistem padang lamus tropis keberadaannya bersifat ekstensif disemua bagian Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate, utamanya pada daerah-daerah berpasir berlumpur. Padang lamun tersebut berfungsi sebagai habitat mencari makan bagi beberapa jenis penyu seperti penyu hijau dan penyu sisik, duyung, dan ikan-ikan herbivore. Kedua jenis ekosistem terdapat di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate merupakan ekosistem yang berperan penting tingginya produktivitas.

Ikan merupakan organisme yang banyak terdapat pada ekosistem karang, dan merupakan penyokong hubungan yang ada dalam ekosistem. Ikan yang ditemukan di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate terdiri dari ikan karang dan ikan pelagis. Kedua jenis ikan tersebut mempunyai keanekaragaman cukup tinggi. Tingginya keanekaragaman berbagai jenis ikan disebabkan terumbu karang mempunyai berbagai variasi habitat, mulai

dari daerah berpasir, berbagai lekuk dan celah, daerah algae dan juga daerah-daerah dangkal dan dalam serta zona-zona yang berbeda melintang karang. (Indra 2006 : 48-49).

Survey yang dilakukan LIPI tentang keragaman ikan pada tiga belas karang ditemukan 325 genus dari 34 famili. Jenis-jenis ikan yang ditemukan oleh famili *Chaetodontidae*, *Pomacentridae*, *Labridae*, *Scaridae*, *Pomachantidae*, *Apogonidae*, *Gobiidae*, *Lucanidae*, *Caesiosidae*, dan *Mullidae*. Sedangkan jenis ikan pelagis yang biasa ditemukan antara lain ikan Hiu (*Sphyna spp*), Cakalang (*Katsuwonius Pelamis*), Tenggiri (*Seomberomorus sp*), Tuna (*Thumus Albacores*). Flora dari wilayah ini belum dikaji seintensif mungkin, namun dalam studi tentang dataran karang ditemukan banyak padang rumput laut di sepanjang atol. Keberagaan karang relative tinggi degan lebih 200 spesies karang yang mewakili 52 genus yang tercatat (LIPI 1995). Kekayaan sumber daya laut di Kawasan Taka Bonerate sangat besar nilainya tidak sebanding dengan pemanfaatan yang dilakukan masyarakat lokal. Namun, faktor sumber daya manusia yang tidak mampu memanfaatkan secara efisien, maka cari jalan yang mudah untuk mendapatkan hasil. Walaupun cara tersebut merusak alam dan ekosistem. Perlu adanya pemberian pemahaman dan mengetahui yang begitu efisien dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan tetap ramah lingkungan.

Selain ikan juga ditemukan jenis hewan reptilia dan mamalia. Hewan reptilian yang dilindungi sering ditemukan yaitu Penyu atara lain Penyu Hijau

(*Chelonia Midos*), Penyu Sisik (*Eretmochelys Imbricata*), Penyu Tempayan (*Carena-Careni*), Penyu Belimbing (*Dermochelys Coriacea*), Penyu Lekang (*Lepidochelys Olivaeat*) dan Penyu Pipih (*Chelonia Depressus*), sedangkan hewan mamalia yang sering ditemukan seperti Ikan Paus (*Cetacea sp*), Lumba-Lumba (*Tursiops Truncates*) dan Ikan Duyung (*Dugong-Dugong*), (WWF dan LP3M, 1994).

Sehingga usaha penangkapan ikan perlu ada keterampilan bagi masyarakat dengan menggunakan teknologi baru yang efektif dan efisien. Hal ini untuk mengantisipasi persaingan penangkapan oleh negara lain dan nelayan pendatang yang sering masuk perairan Indonesia pada umumnya dan di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate pada khususnya dengan teknologi lebih moderen. Penyadaran perlu diberikan kepada masyarakat adalah bahaya penangkapan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan peledak atau penggunaan zat kimia.

Aktivitas ekonomi komunitas di Kawasan Taka Bonerate melibatkan semua keluarga dalam penangkapan ikan baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual. Kebanyakan penghasilan diperoleh dari melaut untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut Jackie dan Linda (2005 ; 374) bahwa tingkat pendapatan sebagian besar rumah tangga relative renda, berkisar dari Rp. 50.000,- hingga Rp. 250.000,- perbulan pada tahun 1991. Sedangkan pendapatan perkapita pertahu sekitar Rp. 460.000,- termasuk tingkat terendah secara nasional, rata-rata pendapatan perkapita di Indonesia adalah Rp. 705.000,-

(Sawyer, 1992). Jika dibandingkan dengan kemiskinan penduduk Kawasan Taka Bonerate, potensi perikanan justru menunjukkan potensi ekonomi wilayah ini. Perubahan sistem sosial ekonomi masyarakat yang memanfaatkan sumber daya laut, tidak banyak membawa manfaat bagi Komunitas Kawasan Taka Bonerate.

B. Persepsi *Community Development*

Dari sudut Sosiologi, kata *Community* berasal dari bahasa Latin “*munus*” yang bermakna *the gift* (memberi), *cum* dan *together* (kebersamaan) antara satu sama lain. Dapat diartikan komunitas adalah sekelompok orang saling berbagi dan saling mendukung satu sama lain. Syarat pokok agar mereka berbagi dan saling mendukung adalah adanya interaksi sosial sehari-hari yang intensif.

Lahirnya *Community Development* berkaitan dengan komprehensif sebelumnya yang telah dikembangkan sejak paruh abad ke-19 di Inggris dan Denmark. Hal serupa berkembang pula di Amerika Serikat, terutama konsep “*Land Grant*” *Agricultural College* yang didirikan berdasarkan *Morril Act* pada tahun 1862 dan sesudah itu pendirian balai percobaan pertanian sebagai metode perkembangan pertanian dan pendidikan, terutama pendidikan masyarakat, kesejahteraan sosial, serta metode-metode dan konsep-konsep ekstensi pertanian yang telah melandasi perkembangan *Community Development* di Amerika Serikat (Brokensha dan Hodge (1969) dalam Kalangie (1994 :60). Gerakan *community development* di Amerika Serikat

lebih nyata sejak tahun 1916, saat nama *Agricultural Extension Service* didirikan untuk memberikan latihan teknik-teknik bercocok tanah yang lebih produktif dan pekerjaan keterampilan rumah tangga kepada para petani. Badan ini memiliki peranan tersendiri karena sesaat kemudian gagasan badan ini dijadikan model dari banyak sekali program *community development* (Foster 1976 dalam Kalangie 1994 ; 60-61)

Sosiologi pembangunan, Fortes dalam Kalangie 1994 ; 60-61, memberi penjelasan bahwa mengenai pembangunan masyarakat merupakan proses adaptasi dari sistem sosial dan lingkungan yang harus dipersatukan. Sedangkan Antropologi memandang pembangunan adalah proses yang muncul dari sosial budaya. Perubahan sosial berasal dari budaya yang menekankan pada perubahan teknologi produksi, distribusi barang dan jasa.

Pada semua komunitas ditemukan dua hal utama yakni kesamaan dan identitas (*similarly or identity*). Komunitas terbentuk karena memiliki kepentingan bersama. Subtansi dari elemen-elemen komunitas tersebut adalah terbentuknya kebutuhan situasi sampai *interest* dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan bahkan nilai-nilai serta norma-norma.

Apapun definisinya komunitas harus memiliki sifat interaksi serta memiliki orientasi. Keanggotaan sebuah komunitas terbentuk lebih karena adanya struktur yang alamiah. Ciri utama dari suatu komunitas adalah adanya keharmonisan, egalitarian, sikap saling berbagi nilai dan kehidupan. Community begitu penting.

Begitu besar peran komunitas karena dapat menjadi *representative* kebutuhan individu-individu di dalamnya, dapat menciptakan keselarasan dengan alam, dan memungkinkan untuk berinteraksi dengan lembaga-lembaga diluarnya. Suatu komunitas tidak akan menutup dirinya sendiri. (Syahyuti, 2005).

Perkembangan lanjutnya dari *community development* adalah penerapan di negara-negara berkembang melalui bantuan ekonomi serta peranannya yang dimainkan oleh tenaga-tenaga ahli dari negara-negara barat dalam program-program *community development*. Program ini berpangkal pada pengamatan mengenai berbagai masalah ekonomi, politik dan sosial budaya yang dihadapi oleh dunia, terutama negara-negara berkembang setelah perang Dunia II. Sehubungan dengan itu *community development* meningkat menjadi gerakan internasional Dunia Ketiga pada saat perumusan kembali *community development* sebagai hasil dari *Cambridge Summer Conference on African Administration* pada tahun 1984. dalam waktu singkat rumusan konferensi ini tersebar dan mulai diterapkan di banyak negara berkembang. (Kalangie 1994 ; 61).

Dengan rumusan ruang lingkup *community development* menjadi sangat luas, mencakup sektor-sektor : kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, sanitasi lingkungan, kesehatan, kesejahteraan ibu dan anak, industri rumah tangga, pendidikan anak, dan lain-lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.

Ruang lingkup ini merupakan ciri *community development* tahun-tahun limapuluhan dan enampuluhan.

Community development mendapat perhatian khusus oleh praktisi dan akademisi. Baik antara teori, praktek, strategis dan analisis dalam menerapkan atau implementasi suatu program. Menurut Christenson dan Robinson, (1994) bahwa yang terpenting dalam *community development* adalah model pembangunan *self-help*, *technical assistance* dan *conflict*.

Secara umum *community development* yang di gambarkan oleh International Center for Sustainable Development (ICSD) (2006), Syahyuti (2005), dan Kalangie (1994) bahwa dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apa bila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Program *Community development* memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*lokal resource based*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Dua sasaran yang ingin dicapai yaitu: sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan. Sasaran pertama yaitu kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (*empowerment*) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan

(*equity*) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (*security*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kerjasama (*cooperation*), kesemuanya berjalan secara simultan.

Selanjutnya menurut Foster dalam Kalangie 1994 ; 65, mengemukakan bahwa hampir semua program *community development* yang besar pernah ada, setidaknya menunjukkan enam ciri pokok, yang akan dikemukakan dibawah ini :

Pertama, Tujuan-tujuan dicapai bermakna serba guna. Program-program *community development* biasanya dirancang dan menangani masalah dari berbagai sektor, terutama pertanian (*Resources management*), kelompok masyarakat lokal (*organizing*) dan pendidikan (*education*). Namun dampaknya akan mempengaruhi semua sector kehidupan komunitas. Dengan sendirinya organisasinya harus mampu mengkoordinasikan tenaga-tenaga ahli selain program-program antara departemen untuk jangka waktu yang panjang.

Menurut Darmawan Salaman, (2005) bahwa, implementasi dari *community development* untuk pengelolaan *sosial forestry* di Indonesia adalah terlepas dari yang dianut, terdapat tiga unsur yang selalu terkait. Ketiga unsur itu adalah pendidikan komunitas (*Community education*), pengorganisasian komunitas (*community organizing*) dan manajemen sumber daya manusia (*community resources management*)

Kedua, Penekanan pada partisipasi komunitas dan prakarsa yang berasal dari komunitas itu sendiri. Untuk dapat menjelaskan gagasan ini komunitas diajak untuk mengidentifikasi sendiri kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan persepsi dan harapan mereka serta menentukan urutan prioritas kebutuhan (*felt needs*). Syahyuti (2005 ; 23) menyebutkan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan petani diutamakan berdasarkan kebutuhan. Di mana petani menggunakan prinsip-prinsip komunitas dalam setiap proses, sebab kegagalan selama ini petani selalu menggunakan pendekatan individual dan rumah tangga. Namun apa bila petani menggunakan pendekatan horizontal sesama petani maka inilah modal sosial dalam merancang prioritas kebutuhan petani.

Ketiga, Penggunaan sumber daya dari komunitas sendiri. dengan azas menolong komunitas supaya dapat menolong diri mereka sendiri dengan sumber daya setempat, maka tenaga-tenaga dari luar bertugas memberikan bimbingan individu, bimbingan teknis, menyiapkan bahan-bahan yang tidak terdapat dalam lingkungan setempat, serta mengkoordinasi dengan program-program regional dan nasional yang lebih luas. Ciri yang ini lebih menekankan pada penyadaran kritis komunitas setempat terhadap sumber daya alam setempat. Darmawan Salaman (2005), Crhistenson dan Robinson, (1994), bahwa pengalaman dari berbagai negara menunjukkan tiga model dalam praksis *community development* yakni model bantuan teknis (*technical assistance*) pemandirian (*self-help*), dan konflik (*conflict*).

Keempat, peningkatan dan pemberian tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin setempat. *Community development* menekankan bahwa tanpa tokoh-tokoh formal (dipilih dan memilih) dan informal (tidak resmi sebagai pejabat atau untuk turut merencanakan dan memimpin pelaksanaan program serta merupakan pula contoh bagi penduduk yang lebih konservatif. Sejalan dengan hasil artikel yang ditulis oleh Budiati, (2006) bahwa, banyak kebijakan pengelolaan sumber daya tidak berhasil dilakukan, karena pengelola (pemerintah) tidak dapat mengatsi keadaan. Penyebabnya adalah pertama, biaya transaksi dalam penegakan aturan atau penjagaan sumber daya seperti biaya pengawasan, personil, dsb. Sehingga penumpang bebas dan tidak dapat dikontrol. Kedua, tindak oportunis (*opportunistic behavior*) perburuan rute oleh aparat pengawas lapangan yang begitu luas. Jadi, betapa penting para *stakeholder* yang ada pada masyarakat setempat untuk dilibatkan (*partisipasion*) dalam perumusan, pelaksanaan, evaluasi suatu kebijakan yang akan diterapkan. Atau aturan lokal, norma dan nilai yang belum dikenal secara meluas, seperti pengaturan akses dan teknologi penangkapan ikan di suatu kawasan terumbu karang. Namun aturan pengelolaan sumber daya laut tidak terlalu asing di Indonesia, karena telah dan atau pernah diterapkan antara lain *Sasi* di Maluku, *Panglima Laut* di Aceh, *A wing-a wing* di Lombok, dan *Panglima Menteng* di Selayar.

Kelima, pembinaan karakter atau mental. Ciri *community development* ini merupakan kesadaran mandiri pribadi dan keyakinan pelaksanaan

projek-projek mereka sebagai satu bentuk tanggung jawab dan kewajiban, serta kemampuan mengorganisasikan dan mengelola tujuan kegiatan-kegiatan yang diperlukan sebaik mungkin supaya hasil atau tujuan yang mereka putuskan bersama dapat terwujud. Para ahli *community development* yang sangat mendukung pentingnya pembinaan karakter ini menyatakan bahwa “bahkan apa yang dikerjakan tetapi bagaimana cara mengerjakannya” (Colonial Office 1958 dalam Kalangie 1994; 62). Ciri ini menekankan pada fungsi institusi lokal dalam melakukan pembinaan dan memberikan contoh kepada komunitas lainnya. Menurut Syahyuti, (2005) bahwa pembinaan karakter dan mental adalah melalui proses interaksi sesama komunitas yang dilandasi oleh tujuan bersama berdasarkan nilai, norma dan aturan bersama. Membantu sesama tanpa harus mengharapkan imbalan. Sedangkan pembinaan khusus tentang motivasi ekonomi dari pelaku dalam berinteraksi.

Keenam, Peranan pemerintah tingkat desa. Semua program *community development* memiliki sejumlah tenaga atau petugas tingkat desa yang dapat bekerja secara serba guna. Biasanya sebelum bertugas mereka dilatih masalah praktis dan keterampilan dalam bidang segala sector, tergantung kebutuhan masyarakat setempat. Peranan mereka bukan hanya menggerakkan penduduk desa untuk datang dengan senang hati melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dan memberi bimbingan praktis, tetapi juga sebagai pembantu tenaga-tenaga teknis berperingkat lebih tinggi. Kalau dilihat bukan saja pemerintah yang harus terlibat disini, tapi pihak swasta

juga amat penting untuk berperan. Seperti pada Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), memiliki salah satu yang bertugas sebagai Fasilitator Desa. Tugas mereka mendampingi komunitas dalam memahami dan menyadarkan mereka akan pentingnya kemandirian untuk keluar dari kemiskinan melalui pengorganisasian/ lembaga.

C. Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Masyarakat (*Community Resource Management*)

Kebanyakan literature membahas peran aktif masyarakat lebih menggunakan istilah *Community Based*. Oleh karena itu, pada thesis ini menggunakan istilah *community based* dalam menjelaskan pembangunan komunitas berbasis masyarakat lokal. Pertanyaan yang paling pertama muncul adalah apakah arti berbasis masyarakat (*community-based*) ?. Beberapa pokok oikiran Brundtland Report 1987 dalam Satria (2004) adalah :

1. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat mencukupi kebutuhan sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.
2. Pembangunan berkelanjutan memerlukan perubahan kerangka hukum dan kelembagaan.
3. Hukum yang diperlukan adalah hukum yang didukung oleh masyarakat sehingga menimbulkan partisipasi masyarakat yang lebih besar.

4. Cara yang terbaik adalah melalui:
 - a) Desentralisasi pengelolaan sumber daya yang menjadi penopang masyarakat setempat; dan,
 - b) Pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumber daya.
5. Selain itu perlu juga didorong:
 - a) Sumber daya tersebut.
 - b) Inisiatif-inisiatif masyarakat;
 - c) Pemberian wewenang pada organisasi-organisasi masyarakat, dan
 - d) Memperkokoh demokrasi setempat.

Inti pengertian berbasis masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam adalah bahwa pengelolaan sumber alam itu dilakukan melalui cara desentralisasi pengelolaan sumber daya yang menjadi penopang masyarakat setempat dan adanya pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumber daya tersebut

Community Based Management (CBM) mengandalkan kepada “komunitas”, merupakan sebagai pelaku utama pembangunan. Semua yang datang dari luar hanya pendukung untuk membantu komunitas. Komunitas didukung melalui berbagai hal mulai penelitian, pengembangan kebijakan, pendidikan dan penguatan kapasitas, serta penguatan jaringan. *Community Based Management* (CBM) dapat dilakukan pada berbagai komunitas

manapun, baik pertanian, perikanan, kehutanan, maupun industri pedesaan. (Syahyuti 2005 : 102-115). Satu konsep yang dekat dengan *Community Based Management* (CBM) adalah *Community Resource Management* yang merupakan suatu pendekatan pembangunan yang menekankan kepada kesaling hubungan manusia dengan lingkungannya. Kerusakan sumber daya alam akan berdampak pada kehidupan manusia. Karena itu manusia harus mengontrol aktifitasnya, misalnya dengan selalu menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan.

Community Based Management (CBM) dimulai dengan pengembangan komunitas yang terdiri atas individu-individu yang paham tentang ekosistem dan ingin bekerja dengan orang lain secara inklusif dan hormat untuk memperbaiki dan menjaga kesehatan lingkungannya, mencoba untuk menyediakan kehidupan yang *sustain* untuk generasi sekarang dan mendatang, serta memiliki komitmen dengan keadilan sosial. (Syahyuti 2005 : 102-115).

Konsep yang dekat dengan *Community Based Management* adalah *Community Resource Management* yang merupakan pendekatan dalam pembangunan yang menekankan pada kesaling hubungan antara manusia dengan segala hal di lingkungannya.

Dari konsep *Community Based Management* (CBM) lahir pendekatan pengelolaan sumber daya alam oleh, untuk dan dengan komunitas lokal. (Gibbs dan Bromley, 1989 dalam Syahyuti 2005 : 102-115). Keberlanjutan

pengelolaan sumber daya tergantung kepada partisipasi komunitas lokal. Mereka akan aktif apabila mereka mampu melihat keuntungan dengan keterlibatan dan memiliki akses terhadap sumber daya.

Tingkat efektifitas jika mengandalkan pengelolaan masyarakat lokal adalah masih berjalannya mekanisme tekanan dan sanksi, dapat menggambarkan secara detail pengetahuan lokal dan dinamika ekologisnya, serta komunitas lokal akan lebih mendorong konservasi sumber daya alam.

Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam begitu pula pada pengelolaan sumber daya laut. Pengelolaan sumber daya laut merupakan pendekatan yang melihat dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan guna mencapai pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam usaha manusia dalam merubah ekosistem sumber daya alam, agar manusia memperoleh manfaat yang maksimal dengan mempertahankan kontinuitas produksinya. Pengelolaan sumber daya laut merupakan salah satu penghususan dari pengelolaan sumber daya alam.

Nessa (1981 : 7) dan Kusumastanto (1984 : 9) dalam Baso (2004 : 27), pengelolaan sumber daya alam merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan sumber daya laut serta dengan mempertahankan kelestarian. Kegiatan tersebut meliputi pengaturan penangkapan, menjaga kawasan produksi dan produktivitas alam, dan mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk

menjaga kelestarian yang sebelumnya bersifat statis menjadi bermanfaat secara ekonomi.

Pengelolaan sumber daya laut merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan eksploitasi dengan tetap menjaga kelestarian. Pada umumnya tidak langsung ditunjukkan pada lautnya akan tetapi lebih cenderung pada usaha pengaturan aktivitas pemanfaatnya dan usaha perbaikan lingkungan. (Anderson 1996 dan Rounselfel, 1975).

Clark dan Munro (1975 : 92-106) dalam Baso 2004 : 27-31), merumuskan pendekatan sumber daya laut berkelanjutan dilakukan sebagai berikut :

- a) Sustainable secara ekologi,
- b) Sustainable secara Sosial Ekonomi. Misalkan dalam mempertahankan atau memacu kesejahteraan sosial ekonomi jangka panjang kesejahteraan sosial ekonomi berdasarkan pada perpaduan antara indicator ekonomi dan sosial yang relevan, fokus utama adalah keuntungan bersih yang senantiasa meningkatkan baik dalam jumlah maupun pemerataan.
- c) Sustainable masyarakat menekankan pada tingkat mikro. Misalnya menekankan pada keinginan akan memepertahankan sistem manusia yang sangat berharga pada kebenaran mereka sendiri.

- d) Sustainable institusi melibatkan penjagaan kecocokan finansial, admisnistarasi, dan kapasitas organisasi jangka panjang sebagai persaratan ketiga komponen sustainable di atas.

Jadi, pengelolaan sumber daya laut harus berlanjut secara terus menerus yang dilandasi dengan kelestarian alam. Pengelolaan berkelanjutan adalah suatu strategi perencanaan pembangunan yang membatasi pemanfaatan ekosistem. Pembatasan yang luwes yang tergantung pada kondisi sosial ekonomi, lingkungan serta kemampuan manusia menerima dampak kegiatannya.

Strategi perencanaan pengelolaan sumber daya laut yang mengintegrasikan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Perencanaan horisontal dan vertikal ekosistem darat dan laut, sains dan manajemen sehingga pengelolaan sumber daya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pengelolaan sumber daya laut harus memiliki hasil yang nyata. Sebab, masyarakat terlibat hanya bila mereka melihat keuntungan secara kasat mata baik dari hasil yang diproduksi. Selain itu, mereka mau terlibat bila memiliki kemampuan yang sesuai dari sisi pengetahuan dan teknologi. Karena itu, pengetahuan lokal (*lokal indegenous knowledge*) perlu dipertimbangkan.

Kerusakan sumber daya alam, akan berdampak kepada kehidupan manusia. Karena itu, manusia harus mengontrol aktifitasnya, misalnya

dengan selalu menggunakan sumber daya dengan yang dapat diperbaharui (*renewal*) dan berkelanjutan. *Community Resource Management* dimulai dengan pengembangan komunitas (*building communitites*), yang terdiri atas individu-individu yang paham akan ekosistem, sumber daya alam, dan lingkungannya, serta ingin bekerja sama dengan orang lain secara inklusif dan ramah lingkungan, mampu memberikan dan menyediakan sumber kehidupan yang *sustainabel* untuk generasi sekarang dan yang akan datang serta mempunyai komitmen terhadap kehidupan sosial ekonomi.

Pada prinsipnya *Community Natural Resource Management* menekankan pada suatu aktifitas manajemen sumber daya alam oleh dan untuk, dengan komunitas lokal. Keberlangsungan *Community Natural Resource Management* tergantung dari partisipasi dan peran aktif masyarakat lokal. Masyarakat aktif jika melihat keuntungan dengan keterlibatannya dan memiliki akses terhadap sumber daya alam tersebut. Penting untuk memahami bagaimana organisasi yang kuat milik masyarakat yang ada dalam masyarakat lokal tersebut.

Ada beberapa tujuan *Community Natural Resource Management* menurut Syahyuti, 2005 antara lain yakni :

1. Peningkatan kesejahteraan dan keterjaminan hidup masyarakat.
2. Peningkatan konservasi sumber daya alam dan
3. Pemberdayaan masyarakat lokal.

Asumsi pentingnya peranan masyarakat lokal adalah efisiensi dan efektifnya yang lebih besar dalam mengatur sendiri sumber daya alam sesuai dengan pengetahuan masyarakat lokal, yang lebih menghemat biaya, dan keputusan lebih baik akan mencapai melalui internalisasi biaya sosial dan lingkungan. Tingginya efektifitas jika mengandalkan pengaturan masyarakat lokal adalah karena masih berjalannya mekanisme tekanan dan sanksi, norma, nilai dan aturan yang telah disepakati bersama, hasil dari pengetahuan masyarakat lokal mengenai lingkungan sosial yang khas.

Pengaturan sumber daya tidak terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Sebagian besar pengguna sumber daya berinteraksi dengan pihak lain dalam suatu lingkungan kelembagaan di luar pengaturan kepemilikan kolektif. Lingkungan kelembagaan eksternal ini bisa saja secara langsung atau tidak langsung mendukung atau menghambat organisasi atau pelaksanaan rezim kepemilikan kolektif atau komunal. Komunitas nelayan Dusun Lemba memiliki kapasitas untuk mengatur pengelolaan sumber daya terumbu karang yang berada di sekitar pulaunya. Pengelolaan ini dapat dikatakan sebagai pengelolaan berbasis masyarakat atau dikenal sebagai CBM (*“community-based management”*) yang terbentuk dan dilaksanakan oleh komunitas ini, meskipun tanpa adanya penyuluhan atau pendampingan dari pihak luar. Pengelolaan sumber daya komunal semacam ini hanya dapat berkesinambungan jika memenuhi beberapa syarat atau prinsip tertentu. Salah satunya adalah pengakuan dari lingkungan kelembagaan eksternal,

dalam hal ini adalah pemerintah tingkat nasional, regional dan lokal, terhadap hak atau otonomi komunitas untuk mengorganisasi suatu pengaturan kelembagaan komunal. Diakui bahwa aksi bersama atau pengaturan kelembagaan oleh komunitas lokal dalam pembangunan desa, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dipengaruhi oleh antara lain :

1. Struktur institusi makro antara lain hukum, kebijakan, program, dan
2. Modal sosial yang mencakup jaringan, peran, norma timbal-balik, nilai, keyakinan.

Dengan demikian, baik struktur makro, maupun kondisi mikro di suatu komunitas penting dalam membentuk insentif atau disinsentif terhadap aksi bersama. Masyarakat akan antusias jika melihat keuntungan (*tangible benefit*) secara kasat mata baik dari sisi produk yang akan dihasilkan, jasa yang diberikan, ataupun pendapatan. Selain itu, mereka mau terlibat jika mempunyai kemampuan lebih melalui teknologi dan pengetahuan. Karena itu, *loval indigenous knowl edge* perlu dipertimbangkan.

Dalam menyusun instrument kebijakan dan pendekatan, berbeda antar level. Pada level lokal dan lapang harus fokus pada pengembangan sistem manajemen yang bertolak dari kondisi nyata yang ada di masyarakat, pada level menengah baik pemerintah maupun non-pemerintah harus mampu menerjemahkan kebijakan menjadi pendekatan pembangunan dalam aktivitas yang konkrit, pada level nasional, harus mampu merincih dan

mengimplementasikan kebijakan yang diterapkan lebih tepat terhadap sasaran.

Uarian di atas bahwa mengungkapkan rencana menggunakan prinsip pembangunan berbasis komunitas dari setiap proses. Pilihan terhadap paradigma ini dirasa tepat, karena konsep pembangunan kelautan selama ini yang berlandaskan pada pendekatan individual dan rumah tangga kurang berhasil. Dengan menerapkan pembangunan berbasis komunitas lebih menghargai dan menekankan pada ikatan institusi-institusi dan pranata-pranata sosial horizontal, yang berkembang di masyarakat. Pranata dan institusi sosial ini merupakan modal *sosial capital* yang sangat besar yang selama ini kurang diperhatikan.

Bukti diterapkannya konsep pembangunan berbasis komunitas, setidaknya terlihat dari empat bentuk antara lain :

1. Penetapan lokasi program pada desa sebagai unit terkecil,
2. Penempatan *participatory rural appraisal* dalam penyusunan rencana aksi yang dilakukan secara partisipasi,
3. Upaya meningkatkan kemandirian,
4. Serta menggunakan institusi dan pranata lokal.

Upaya untuk mendongkrak kemandirian lokal dapat dipandang sebagai bentuk penguatan kesatuan masyarakat sebagai komunitas adalah ketonomiannya yang tinggi. Dengan kemandirian yang tinggi, maka keotonomian masyarakat terbangun dengan sendirinya.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan yang menggunakan prinsip basis komunitas adalah kebutuhan waktu yang lebih lama, karena setiap tahapan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat secara partisipasi. Proses tersebut dapat menjadi lebih cepat apabila dapat didorong melalui interaksi yang lebih intensif di antara sesama warga, karena kegagalan maupun keberhasilan akan tergantung pada kesadaran, terbangunnya pembelajaran, dan menjamin kerjasama antar (*co-management*) warga. Sehingga para pelaksana harus membuat kebijakan sesuai dengan pola dan bentuk komunitas, dan mengembangkan program yang khas berdasarkan kondisi masyarakat lokal.

Pada tahap implementasi program pembangunan masyarakat perlu dibangun *capacity building*, serta partisipasi dan sosialisasi untuk memberikan pemahaman. Kata kunci pokoknya adalah bekerja penuh dengan komunitas sejak awal. Secara bertahap komunitas akan mengambil alih tanggung jawab ketika kapasitasnya juga meningkat. Karena itu, partisipasi dan dukungan komunitas harus memadai. Untuk perlu dilakukan peningkatan *capacity building* untuk komunitas. Peningkatan *capacity building* menganut pendekatan *co-management* dimana masyarakat dan pemerintah bekerja sama, dan adanya pemimpin masyarakat lokal yang kuat.

Banyak proyek yang gagal karena target *audience proyek* hanya pada para nelayan tidak atau menyepelekan para *stakeholder* penggunaan sumber daya yang lainnya. Seperti yang digambarkan oleh Carlos dan Pmomeroy,

1996 dalam Lampe dan Ansar, 2004), bahwa di Philipina misalnya, proyek awal *community based management* berfokus pada kegiatan-kegiatan nelayan belaka. Sementara itu ada manfaat bagi nelayan, sering memencilkan *stakeholder* lain, seperti pedagang ikan terhadap nelayan yang mempunyai hubungan sangkut paut. Melalui hubungan ini pedagang ikan dapat sering mengontrol aksi-aksi nelayan. Aliansi pedagang ikan menjuruskan mereka memaksa nelayan terhadap rencana-rencana yang terorganisir dan institusional yang dibuat di bawah proyek *community based management*.

Lanjut yang disampaikan dalam hasil penelitian Munsir dan Ansar, 2005 bahwa untuk pekerjaan *co-management* adalah esensi bagi partner memiliki pemahaman yang baik tentang posisi mereka masing-masing. Melakukan konsultasi informal pada bantuan permulaan penciptaan kepentingan dalam isu dan memungkinkan *stakeholders* mengespresikan pandangan-pandangannya pada opsi pengelolaan alternative (*rapport*).

Sebagai konsep pembangunan juga fokus kepada permasalahan hubungan-hubungan sosial dan politik. Karena itu, tidak dapat dipandang sebagai terisolasi dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dalam konteks *capacity building* sebagai suatu pendekatan dalam pembangunan, maka akan melibatkan indentifikasi berbagai kendala dalam pembangunan. Pembangunan pada pokoknya adalah bagaimana agar dicapai perubahan

positif dalam hidup, kemajuan personal bersama-sama dengan kemajuan masyarakat secara umum, dan bagaimana proses serta hasilnya terhadap upaya pengurangan kemiskinan, ketidakadilan, Diskriminasi, dan merealisasikan potensi manusia melalui keadilan sosial dan ekonomi.

E. Kerangka Pikir.

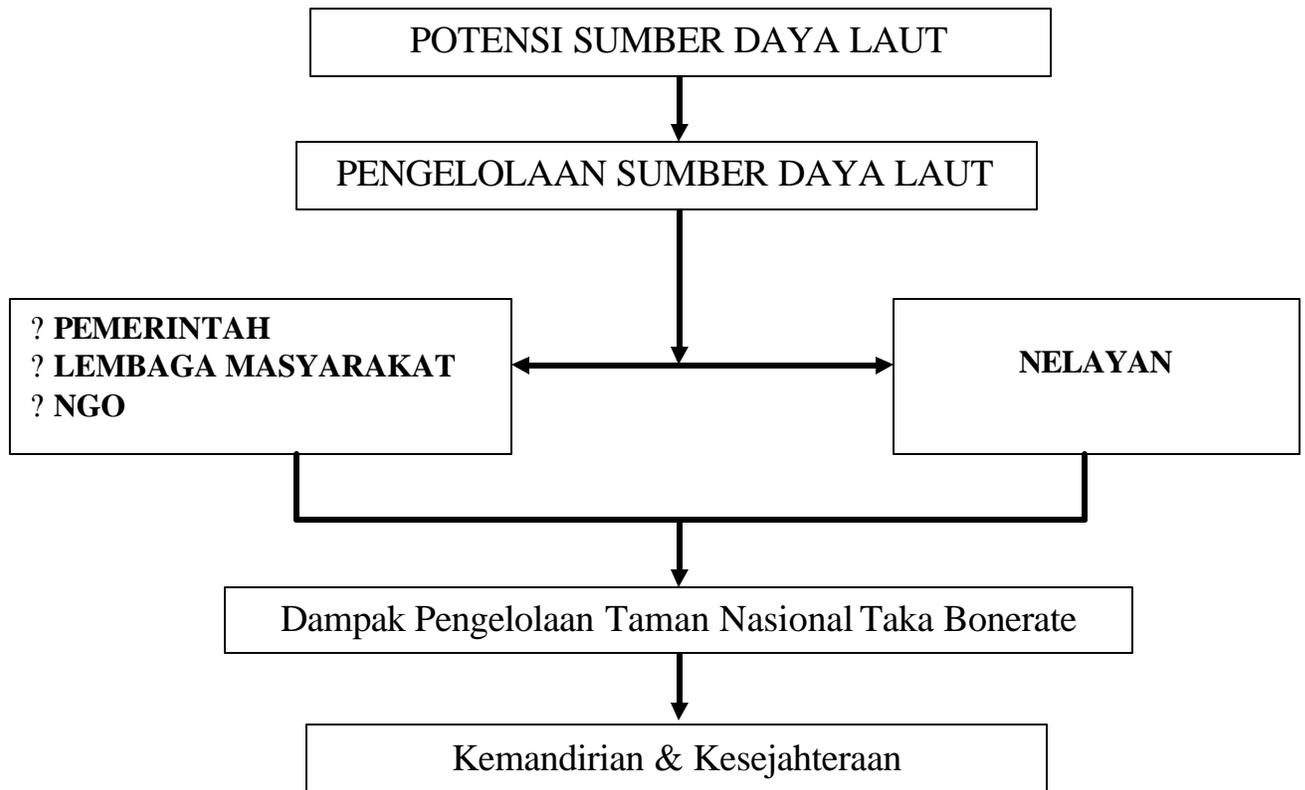
Pengelolaan sumber daya laut yang berbasis masyarakat dipandang sebagai paradigma baru. Paradigma ini muncul karena kekuarang puasan terhadap pendekatan sebelumnya, yang cenderung undividualistik dan bias ekonomi pasar. Pendekatan pembangunan berbasis masyarakat menggunakan ikatan-ikatan horizontal sebagai pilar utama dan menggunakan kaca mata yang lebih luas (dari sekedar pembangunan ekonomi) dapat dipandang sebagai inovatif dalam pembangunan. Ikatan horizontal dan suau komunitas merupakan bagian bagian kekuatan modal sosial yang sangat penting untuk mengembangkan berbagai tindakan kolektif. Salah satu syarat tumbuhnya perilaku kolektif adalah dengan terbangunnya suasana yang partisipasi, mulai perencanaan sampai pelaksanaan.

Sumber daya laut yang ada di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate perlu sebuah perencanaan pengelolaan yang tepat. Pemanfatan dan eksploitasi yang berlebihan perlu ditata secara berkelanjutan. Potensi yang besar baik secara sosial, ekonomi dan lingkungan sudah semakin menurun akibat pengelolaan yang kurang tepat tanpa ada perencanaan sustainable.

Pengelolaan sumber daya yang ada dilakukan masyarakat lokal dan masyarakat pendatang yang berlebihan tanpa memperhatikan ekosistem. Masyarakat lokal mempunyai sistem pengelolaan yang ramah lingkungan namun dengan perubahan dan tuntutan ekonomi merubah pola pikir masyarakat. Ekosistem dan lingkungan tidak lagi sebagai sesuatu yang dipertahankan. Begitu pula pengaruh dari masyarakat pendatang yang menimbulkan berbagai kecemburuan masyarakat lokal.

Kondisi masyarakat lokal perlu ada intervensi dari sebuah program pemberdayaan. Program dengan mencari pencaharian alternatif selain sebagai nelayan. Hal yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak NGO dalam sebuah program bagi masyarakat lokal. Proses penyadaran dan pemberian pendidikan pengetahuan terhadap teknologi baru untuk mengelolah sumber daya yang ada dengan memperhatikan dampak lingkungannya.

Karangka Pikir yang dibangun sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ini berusaha mendefinisikan konsep-konsep yang sangat umum dan melakukan observasi, mencari literatur baik hasil penelitian, buku, laporan penelitian, artikel atau dari majalah dan surat kabar. Teoritisasi data (*grounded theory approach*) adalah pendekatan penelitian kualitatif dimana teknik dan prosedurnya memungkinkan peneliti untuk mengembangkan teori mendasar yang memenuhi kriteria metode ilmu pengetahuan “baik”, yaitu adanya kebermaknaan, kesesuaian antara teori dan observasi, dapat digeneralisasi, dapat diteliti ulang adanya ketepatan dan ketelitian, serta dapat dibuktikan. Walaupun prosedur ini dirancang agar proses analisisnya tepat dan ketat, namun tidak mengabaikan kreativitas. Kreativitas yang memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan data dan melakukan perbandingan antara pandangan baru tentang fenomena dan rumusan teori yang baru pula. (Strauss dan Corbin, 2003 ; 21).

Metode kualitatif dalam penelitian ini ingin mendapatkan data mengenai *community based* dalam pengelolaan sumber daya laut. *Community Based* yang dimaksud adalah mencari bagaimana *capacity building* dan *co-management* berbagai proses dari pembentukan institusi dan pranata

sebagai pengelolaan sumber daya laut dan institusi yang menggunakan sumber daya alternative di Kawasan Taka Bonerate.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada masyarakat yang ada di pulau Kawasan Taka Bonerate Kabupaten Selayar. Penelitian ini konsentrasi pada Pulau Rajuni. Pulau Rajuni dihuni lebih banyak oleh Suku Bajo, Bugis, dan Makassar yang lebih sering menggunakan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lautnya. Selain itu, Pulau Rajuni merupakan pulau ditengah Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate dan terletak pada yang terletak Zona inti dan Zona Cadangan.

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu empat bulan yakni mulai akhir bulan April sampai awal bulan Agustus. Sedangkan waktu untuk menganalisis data dilakukan selama waktu sebulan lamanya yakni pada bulan Agustus.

C. Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan berdasarkan *purposive* dengan unit analisis adalah para pengelola sumber daya laut (nelayan), para anggota institusi yang memanfaatkan sumber daya alternative (pedagang), dan para ibu rumah tangga. Untuk jenis informan dibagi dalam dua kelompok :

Pertama, informan kunci yaitu orang yang mengetahui dengan jelas masalah-masalah yang berkaitan dengan obyek kajian. Informan kunci adalah para *stakeholder*.

Kedua, informan biasa yakni orang yang dapat diajak berbincang-bincang dan mengetahui sedikit banyak tentang masalah yang diteliti. Orang-orang yang dapat memberikan informasi sebagai pendukung dari apa yang didapatkan pada informan kunci. Bisa jadi informan biasa adalah orang yang diberikan rekomendasi atau ditunjuk oleh informan kunci. Informan biasa sebanyak 40 Orang.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode kualitatif yang digunakan adalah teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan study literatur. Dengan pendekatan tersebut lebih membuat *rapport* dengan responden mudah terbangun. Teknik pengumpulan data observasi mengarahkan untuk memperoleh gambaran situasi dan kondisi masyarakat daerah penelitian. Teknik wawancara mendalam yang diarahkan dengan berdialog lepas dengan informan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data-data langsung dari masyarakat yang menjadi informan. Teknik pengumpulan data dengan study literature untuk mendapatkan data melalui kajian membaca dokuman, buku, majalah, artikel, hasil penelitian sebelumnya dan lainnya yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti.

E. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh, dikumpulkan untuk dianalisis melalui pengkajian secara menyeluruh baik dari hasil wawancara, observasi, catatan-

catatan lapangan maupun dari dokumen-dokumen dalam bentuk buku, artikel dan gambar. Dalam analisis data peneliti melakukan tiga tahap, yaitu :

1. Pengumpulan data, dalam tahap ini penulis melakukan proses penyeleksian data, memfokuskan pengambilan data, dan mengabstraksikan data. Proses ini dilakukan saat penelitian masih berjalan serta memusatkan pengumpulan data pada batasan-batasan masalah yang diteliti dan tidak lupa menulis memo harian.
2. Analisis data, tahap ini penulis telah fokus pada proses analisis dan penyusunan data dengan mengumpulkan semua data yang telah ada untuk kemudian dirangkai dan disajikan dalam bentuk tulisan.
3. verifikasi dalam tahap ini dilakukan verifikasi data dan revisit data jika dibutuhkan untuk kevalidan.

Penulisan dan penarikan kesimpulan, tahap ini merupakan tahapan akhir dari penelitian, dimana data-data yang telah diproses dan dianalisis dengan penarikan kesimpulan akhir yang sifatnya valid lalu dituangkan dalam tulisan dengan bentuk deskriptif. Data disajikan secara terstruktur sesuai dengan kerangka penulisan dengan menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami tanpa menghilangkan sifat ilmiah di dalamnya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KAWASAN TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE

Gugus pulau terpencil di ujung Selatan Sulawesi dikenal dunia dengan keanekaragaman hayati laut terutama terumbu karang, yang terlindung dalam Taka Bonerate. Taka Bonerate adalah atoll ketiga terbesar di dunia, yang merupakan gugusan pulau-pulau kecil dan laguna-laguna yang terbentuk dari endapan pasir dan bioerosi. Hamparan terumbu karang dengan lebar 100 – 500 meter dari garis pantai saat pasang menyebabkan gugusan pulau-pulau ini memiliki pantai yang landai.. Taka Bonerate adalah pulau karang yang terbesar di Indonesia, yang mempunyai luas daratan kurang lebih 222.000 Ha. Berbatasan dengan Sulawesi Selatan di utara, dengan Flores di selatan, Laut Jawa di sebelah baratnya serta Banda di penghujung timur.

Pulau berpenghuni diantaranya adalah Rajuni Besar dan Rajuni Kecil yang memiliki ketinggian kurang dari 3m dari permukaan laut, yang memanjang dari utara ke selatan, demikian juga dengan pulau Latondu Besar dan Latondu, namun dengan ketinggian lebih dari 4m dari permukaan laut. Pulau Tarupa Besar dan Tarupa Kecil, Pasitallu Tengah dan Pasitallu Timur berketinggian 4m dari permukaan laut, sementara Jinato kurang dari 3m dengan ukuran panjang rata-rata 1,6 km.

A. Ciri-Ciri Umum Lingkungan Fisik.

1. Fisik dan Geografis.

Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate memiliki karakter berupa terumbu karang tipe atoll yang terbesar ketiga di dunia setelah Kwajifein di Kepulauan Marshall dan Suvadiva di Kepulauan Moldiva yaitu seluas 220.000 Ha. Secara administrasi pemerintahan, Taman Nasional ini merupakan bagian wilayah Kecamatan Persiapan Pasitallu, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Secara geografis terletak di Laut Flores yaitu antara $120^{\circ}55'$ – $121^{\circ}25'$ BT dan $6^{\circ}20'$ – $7^{\circ}70'$ LS. Secara fisik dibatasi oleh :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sulawesi Selatan,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda.

Sebagai suatu kawasan pelestarian alam, Taman Nasional Taka Bonerate mempunyai fungsi untuk perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keaneka ragaman jenis biota serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman Nasional Taka Bonerate memiliki potensi sumber daya laut berupa Terumbu Karang (231 jenis), ikan (285 jenis), Moluska (216 jenis), Penyu (4 jenis), Echinodermata (4 jenis), Lamun (10 Jenis), serta Alga (47 Jenis). Sebagai suatu kawasan konservasi pengelolaan sumber daya alam laut yang terkandung didalamnya harus dilakukan secara bijaksana agar menunjang

budidaya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pengelolaan dan pengembangan Taman Nasional Taka Bonerate merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah setempat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wilayah tersebut.

2. Demografi dan Kedalaman Perairan

Kawasan Taka Bonerate dihuni oleh penduduk di desa Rajuni, Latondu, Tarupa, Jinato, Tambuna yang semuanya berada dalam kecamatan Pasitallu yang berpusat di pulau Kayuadi. Penduduk mayoritas menempati pulau Rajuni (31,1%). Kawasan ini didominasi oleh dua suku etnis utama, yaitu Bajo/Bajau (dari Sulawesi Tenggara) dan Bugis (dari daratan Sulawesi Selatan dan Selayar). Jinato dan Tarupa di dominasi suku Bugis, malah di Jinato hampir seluruh penduduk berdarah Bugis. Sementara porsi keturunan Bugis dan Bajo berimbang di pulau Rajuni Kecil, dan nampak dari perbedaan konstruksi rumah-rumah mereka. Semakin ke selatan, seperti Pasitallu Timur dan Pasitallu Tengah didominasi oleh suku Bajo. Sejak dahulu mata pencaharian masyarakat kawasan adalah sektor perikanan, dari nelayan, pedangan ikan, pengusaha hasil-hasil laut dan penjual bahan-bahan kebutuhan pokok, serta pengusaha pelayaran, yang semakin bertambah waktu, jumlahnya mengembang.

Kayanya ekosistem terumbu karang di kawasan Taka Bonerate, menyebabkan kawasan ini memiliki semua tipe karang, dari karang penghalang, karang tepi hingga karang atol yang menjadi pusat perhatian dunia. Keaneragaman hayati di dalam ekosistem terumbu karang Taka Bonerate juga terhitung tinggi. Taka Bonerate juga memiliki ekosistem lamun tropis pada daerah dengan substrat pasir lumpur, dan kedua ekosistem tersebut, baik ekosistem terumbu karang maupun lamun, memiliki interaksi yang saling terkait dan berperan penting terhadap produktifitas laut di kawasan tersebut.

Kedalaman perairan di kawasan ini sangat khas dan merupakan ciri istimewa dari kepulauan Bonerate. Sebelah timur pulau Selayar tidak terdapat daratan benua, sehingga terjadi pertemuan langsung antara pesisir dasar laut dengan lereng benua. Perairan dalamnya terdapat di sekitar pulau-pulau dan daratan utama Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan pulau flores, dengan warna biru pekat yang menunjukkan terjal dan dalamnya perairan hingga mencapai 1500 meter.

3. Topografi dan Bithimetri.

Topologi Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate terdiri dari atoll yang merupakan gugusan pulau-pulau kosong karang dan rentangan karang yang sangat luas dan panjang membentuk pulau-pulau dengan jumlah yang cukup banyak. Diantara pulau-pulau dan karang terdapat selat-selat sempit dan terjang memisahkan laut yang dalam. Pada bagian permukaan rata

terumbu karang banyak terdapat kolam-kolam kecil yang didalamnya dikelilingi oleh terumbu karang. Pada air surut terlihat berbatuan dan pasir putih yang dikelilingi genangan air yang berwarna biru pekat yang merupakan perairan yang cukup dalam dan terjal.

Pulau Rajuni ketinggian kurang lebih 3 (tiga) meter dari permukaan laut. Panjang kurang lebih 1,5 km dan lebar 0,5 km. pulau yang kelihatan pasir putih dari kejauhan. Bentuk wilayah datar sampai agak datar dengan kemiringan 0 sampai 3 persen.

4. Iklim

Iklim di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate umumnya adalah iklim basah tropis katulistiwa. Curah hujan bulanan adalah 4 bulan basah (curah hujan > 200 mm) berturut-turut dan 5 bulan kering (curah hujan < 1.000 mm). Menurut klasifikasi Olderman termasuk kedalam Zona Agroklimat D3. Penentuan iklim menurut Schmidt dan Ferguson (1951) dalam Inra (2006) di Kawasan ini terdapat dua Zona iklim yaitu zona C dan zona D. bagian utara zona D termasuk sedang ($Q = 0,333 - 0,0500$) dan bagian selatan zona C termasuk agak basah ($Q = 0,714$).

Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate dipengaruhi oleh musim angin barat, musim angin timur dan musim peralihan (pancaroba). Musim angin barat biasa terjadi antara bulan Januari – Maret yang diikuti musim hujan dengan keadaan angin sangat kencang dan gelombang laut sangat besar. Musim timur terjadi antara bulan Juli – September biasanya diikuti musim

kemarau dan gelombang laut tenang. Musim pencaroba (peralihan) terjadi antara kedua musim tersebut, yaitu pada bulan April – Juni dan Oktober – Desember. Pada musim peralihan ini kadang gelombang laut tidak menentu, kadang-kadang tenang dan kadang-kadang menjadi gelombang besar.

Masyarakat pada musim barat lebih mempergunakan istirahat di pulau dari pada berlayar. Sebagian merawat dan merenovasi perahunya atau kapalnya. Sedangkan pada musim timur masyarakat lebih banyak melaut dan berlayar. Sama halnya pada musim peralihan masyarakat masih menggunkan musim itu untuk siap-siap istirahat atau siap-siap melaut atau berlayar.

5. Ekosistem Laut

Terumbu karang yang menjadi rumah ikan dan tempat berpijah serta berlindung ikan, menjadi sangat penting artinya bagi masyarakat kawasan Taka Bonerate. Karang itu sendiri adalah hewan yang bergantung hidupnya dengan substrat, cahaya matahari cukup, kecerahan air serta hewan – hewan dan tumbuhan laut lainnya yang bersimbiosa, seperti diantaranya Zooxanthellae yang merupakan tumbuhan mikroskopis pemberi warna dan nutrisi bagi karang, yang hidup di dalam badan karang itu sendiri. Sehatnya karang menjadi indikator kelimpahan ikan. Ikan konsumsi berbagai jenis kerapu (sunuk), napoleon, ekor kuning. Ikan hias diantaranya kepe-kepe dengan berbagai marga (Chaetodon, Chelmon)

B. Sosial, Budaya dan Ekonomi.

1. Kependudukan.

Secara Administrasi Kecamatan Taka Bonerate terdapat beberapa desa. Seperti Desa Latondu (meliputi Pulau Latondu Besar dan Pulau Latondu Kecil), Desa Tarupa (meliputi Pulau Tarupa Besar, Pulau Tarupa Kecil, dan Tinabo), Desa Jinato (meliputi Pulau Jinato) dan Desa Pasitallu (meliputi Pulau Pasitallu Timur, Pasitallu Barat dan Pulau Bunging Belle).

Table 1
Jumah Penduduk menurut Jenis Kelamin

No	Nama Desa	Jumlah					
		Laki-Laki	%	Perempuan	%	Total	%
1	Rajuni	838	37.5	724	31.5	1.562	34.5
2	Latondu	288	12.9	306	13.3	594	13.1
3	Tarupa	283	12.6	365	15.8	648	14.3
4	Jinato	420	13.8	427	18.5	847	18.7
5	Pasitallu	402	18.0	474	20.6	876	19.3
Total		2.231	100	2.296	100	4.527	100

Sumber : Data Kecamatan Taka Bonerate Tahun 2005.

Dari segi suku terdiri dari Suku Bugis, Suku Makassar, dan Suku Bajoe serta Flores. Suku dominan adalah Suku Bugis yang berasal dari Bugis Sinjai. Suku Bajoe berasal dari Sulawesi Tenggara masih lebih banyak dari pada Suku Makassar yang berasal dari Pulau Selayar dan Pulau Jampea. Kedua suku dominan yakni Suku Bugis dan Suku Bajoe sangat terlihat jelas pemisahan pemukimannya. Suku Bugis konsentrasi pemukiman pada sebelah selatan sampai pertengahan kampung/pulau, sedangkan Suku Bajoe terkonsentrasi pemukiman berda di sebelah utara kampung/pulau.

Selebihnya seperti Suku Makassar tidak ada konsentrasi pemukiman atau mereka hanya dianggap pendatang.

Mayoritas penduduk menggantungkan hidup sehari-hari adalah melaut. Baik sebagai nelayan atau berlayar (pengusaha angkutan, buruh penangkapan ikan dan cumi-cumi, atau pedagang hasil laut dan keperluan untuk melaut. Untuk propesi sebagai PNS, TNI, Medis presentasenya sangat sedikit dan banyak berasal dari Suku Makassar. Berikut table tentang jenis pekerjaan penduduk.

Table 3
Jenis Pekerjaan Di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate

No	Desa	Pengusaha Pelayaran		Pedagang/Pengumpul		Nelayan		PNS		TNI		Lain-Lain	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Rajuni	26	63.4	45	38.8	188	23	10	32.3	2	28.6	25	27.7
2	Latondu	4	9.8	12	10.6	94	11.5	6	19.4	1	14.3	5	5.6
3	Tarupa	1	2.44	12	10.6	112	13.7	5	16.1	1	14.3	5	5.6
4	Jinatc	8	19.5	22	19.5	223	27.3	4	12.9	1	14.3	15	16.6
5	Pasitallu	2	4.9	22	19.5	200	22.5	6	19.4	2	28.6	20	22.2
Total		41	100	113	100	817	100	31	100	7	100	90	100

Sumber : Data Statistik 2005

Data di atas bisa kita lihat dari jumlah angka penduduk 5.922 yang memiliki pekerjaan sebanyak 1.099 pada jenis pekerjaan sebagai pengusaha pelayaran 41 orang atau 3.37 %, pedagang/pengumpul 113 orang atau 12.07 %, nelayan 817 atau 74.3 %, PNS 31 orang atau 2.8 %, ABRI 7 orang atau 0.6 % dan pekerjaan lain-lain 90 orang atau 8.2 %. Kita lihat bahwa mata pencaharian sebagian besar nelayan sebesar 74.3 % sebagai nelayan, hal ini

menunjukkan bahwa begitu dekatnya penduduk kawasan dengan lingkungan lautnya.

2. Pendidikan.

Gejala yang menjadi potensi rendahnya pemahaman dan pengetahuan pengelolaan sumber daya laut adalah rendahnya tingkat pendidikan formal yang dimiliki masyarakat, bahkan yang tidak pernah mengenyam pendidikan setingkat SD. Mendukung juga minimnya pengetahuan yang berakibat pada keterampilan penduduk dalam hal mengelolah sumber daya laut.

Survey yang dilakukan Tim Sosial Ekonomi Pusat Study Terumbu Karang (PSTK Unhas), tentang tingkat pendidikan penduduk Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate (2005) menunjukkan dari 111 responden atau 29.7 % yang diwawancarai ternyata tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Sebanyak 179 responden atau 47.59 % tidak tamat SD, 81 responden atau 21,65 % tamat SD, hanya 2 atau 0.53 % tamat SLTP dan 2 orang 0.26 tamat SLTA. Lebih jelasnya tampak pada table berikut :

Table 4
Tingkat Pendidikan Penduduk
Di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate

No	Tingkat Pendidikan	Rajuni		Latondu		Tarupa		Jinatop		Pasitallu		Total	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Tidak Sekolah	20	21.3	14	23.7	28	47.5	21	23.9	28	37.8	111	29.7
2	Tidak Tamat SD	44	46.8	33	55.9	22	57.3	32	59.1	27	36.5	178	47.6
3	Tamat SD	29	30.9	11	18.6	8	13.6	15	17.0	18	24.3	81	21.7
4	Tamat SLTP	0	0.0	1	1.7	1	1.7	0	0.0	0	0.0	2	0.5
5	Tamat SLTA	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	0.5
Total		94	100	59	100	59	100	88	100	74	100	374	100

Sumber : Hasil Survey Sosial Ekonomi PSTK-Unhas 2005

Rendahnya tingkat pendidikan formal dan non formal yang mengakibatkan pengelolaan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya sektor kelautan hanya didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan kerja yang diwariskan secara turun temurun. Ditambah lagi dengan rendahnya kesadaran hukum maupun kesadaran lingkungan sekitarnya.

3. Kesehatan.

Fasilitas yang tersedia disetiap desa hanya Pusekesmas Pembantu (pustu). Puskesmas induk berada di Ibu Kota Kecamatan Taka bonerate. Petugas yang bertanggung jawab masing-masing Pustu seorang Bidan dan seorang Manteri.

Rumah penduduk merupakan tipe rumah panggung yang terbuat dari kayu dengan atap seng atau daun kelapa yang dari segi kesehatan cukup

memenuhi syarat. Persolan mendasar adalah ketersediaan air bersih untuk keperluan mandi, mencuci dan minum. Semua pulau tidak ada sumber air tawar untuk keperluan rumah tangga. Air sumur yang menjadi sumber air utama untuk keperluan rumah tangga rasanya payau. Untuk memenuhi air minum penduduk menunggu musim hujan. Musim kemarau saat persediaan air hujan telah habis, penduduk terpaksa membeli air tawar pada pedagang dari Pulau Kayudi (Ibu Kota Kecamatan) dengan harga Rp. 3.000,- s/d 5.000,- perjerigen (20 liter). Kesulitan air tawar inilah yang menyebabkan penduduk terjangkit penyakit kulit seperti gatal-gatal dan jamur.

4. Sosial Ekonomi.

Taman Nasional Taka Bonerate dihuni oleh penduduk dari lima desa yaitu : Desa Rajuni, Desa Latondu, Desa Tarupa, Desa Jinato, dan Desa Tambuna yang termasuk kedalam Kecamatan Taka Bonerate dengan jumlah penduduk 5.403 Jiwa. Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate memiliki tujuh pulau yang berpenghuni menetap yaitu : Pulau Rajuni Besar, Pulau Rajuni Kecil, Pulau Latondu, Pulau Tarupa Tera, Pulau Jinato, Pulau Pasitallu Timur dan Pulau Pasitallu Tengah. Penduduk Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate terdiri/berasal dari dua etnis dominan yaitu Suku Bugis dan Suku Bajoe. Penduduk Suku Makassar (dari Pulau Ibu Kota Selayar) sangat sedikit, sedangkan pendatang dari pulau-pulau sekitar, seperti Bonerate, Jampea dan Kayuadi mengaku sebagai orang Bonerate atau sebagai orang Selayar.

Kawasan ini memiliki potensi ekonomi ikan karang yang tinggi, baik itu ikan konsumsi maupun ikan hias. Dari seluruh produk ikan yang didapat, ikan hidup menjadi komoditas ekspor dengan nilai tertinggi. Ikan karang hidup diekspor ke Hongkong, Jerman, Inggris, Belanda, Singapura, Perancis hingga Amerika Serikat. Nilai ekonomi ikan karang dari Taka Bonerate dimulai dari selera dan status yang melekat pada ikan di kalangan orang Cina, dimana ikan dianggap sumber kemakmuran dan peruntungan yang baik. Harga beberapa jenis ikan Napoleon di Hongkong, misalnya, dapat mencapai US\$ 180/kg, yang menciptakan ladang perburuan baru bagi masyarakat. Kekuatan pasar terutama di Asia menyebabkan semakin gencarnya aktivitas-aktivitas penangkapan ikan ilegal yang mengorbankan kepentingan jangka panjang. Tingginya nilai ekonomis ikan di kawasan ini menyebabkan perlunya pengelolaan sumber daya laut yang bijak dan juga lestari.

Mata pencaharian utama sebagian besar penduduk Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate sejak dahulu sebagai sektor perikanan. Jenis usaha sebagai pengusaha hasil-hasil laut, pedagang ikan, penjual bahan-bahan kebutuhan pokok dan pengusaha pelayaran, yang dari waktu ke waktu semakin bertambah jumlahnya.

Permasalahan kependudukan yang menghambat peningkatan kemajuan masyarakat Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate ialah rendahnya tingkat pendidikan format, bahkan sebagian masyarakat tidak pernah duduk

dibangku sekolah dasar. Hal ini, menunjukkan minimnya pengetahuan dan keterampilan penduduk. Rendahnya tingkat pendidikan formal dan non formal menyebabkan pengelolaan kegiatan usaha ekonomi, khususnya sektor perikanan semata-mata hanya didasarkan dari pengetahuan warisan pendahulu.

Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate potensi ekonomi ikan karang yang tinggi, baik ikan konsumsi maupun ikan hias. Ikan hidup menjadi komoditas ekspor dengan nilai tinggi. Ikan karang hidup diekspor ke Hongkok, Jerman, Inggris, Belanda, Singapura, Perancis, hingga Amerika Serikat. Harga beberapa jenis Ikan Napoleon di Hongkong misalnya dapat mencapai US\$ 180/kg, yang menciptakan ladang baru bagi masyarakat. Kakuatan pasar terutama di ASIA menyebabkan semakin gencarnya aktivitas-aktivitas penangkapan ikan ilegal yang mengorbankan kepentingan jangka panjang. Tingginya nilai ekonomi ikan dikawasan ini menyebabkan perlunya pengelolaan sumber daya laut yang bijak dan lestari.

BAB V

PEMBAHASAN

Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate ditetapkan menjadi Taman Nasional Laut oleh Menteri Kelautan pada tahun 1992 dengan luas 530.765 ha setelah menjadi cagar alam sejak 1989. Taman Nasional Taka Bonerate sebagai salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 280/kpts-II/1992 tanggal 26 Februari 1992. Upaya pengelolaan tersebut dimaksudkan untuk melestarikan sumber daya lama hayati dan ekosistem, guna memenuhi fungsinya sebagai penyangga kehidupan, pengawetan flora dan fauna. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, juga dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi.

Secara operasional Taman Nasional Taka Bonerate berada di bawah pembinaan Sub-Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Selatan. Melalui Proyek Pengembangan Kawasan Konservasi Propinsi Sulawesi Selatan. Pada perkembangannya Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate ditetapkan menjadi Taman Nasional dengan misi dijadikan percontohan model SISKAMLA (Sistem Keamanan Laut). Dengan sistem zonasi laut yang terdiri dari zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan perikanan tradisional. Mengingat rendahnya kesadaran

pelestarian lingkungan faktor pemicu terjadinya kerusakan terumbu karang yang menjadi asset Negara.

A. Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.

1. Keterlibatan Lembaga Masyarakat

Dahulu wilayah Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate dinamakan Pulau Macan. Masyarakat yang bermukim di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate berasal dari suku Bajo dan Bugis. Sesuai informasi hasil wawancara dengan H. Mjd (80 tahun) :

”...pada saat perjuangan melawan Belanda di Kerajaan Bone maka diperintahkan orang Bajo menuju Pulau Sembilan. Setelah sampai di Kepulauan Sembilan Suku Bajo dibawah pimpinan Panglima Menteng merasa tidak cocok dengan daerah ini akhirnya mereka kemudian berlayar menuju Kepulauan Selayar. Perjalanan dilanjutkan ke pulau-pulau yang tidak berpenghuni tepatnya Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate sekarang. Di pulau-pulau kecil ini Panglima Menteng memutuskan untuk berdomisili menjadi wilayah sebagai basis pertahanan dalam peperangan melawan suku Tobelo dari Maluku. Di Kepulauan Selayar pada saat itu berdiri Kerajaan Bonerate. Pada suatu saat Panglima Menteng kemudian bertemu dengan Raja Bonerate di Perairan Jinato. Pada saat itu Panglima Menteng bermaksud memerangi Kerajaan Bonerate. Setelah terjadi perdebatan akhirnya Raja Bonerate menawari Panglima Menteng untuk makan Pinang sebelum berperang. Pinang ini berisi paku merah dan setelah dimakan Panglima Menteng ternyata tidak mempan akhirnya Raja Bonerate mengatakan bahwa mereka masih ada pertalian darah. Peperangan dapat dihindari dan akhirnya sepakat pembagian wilayah kekuasaan. Pembagian ini meliputi semua pulau yang mempunyai dataran tinggi adalah wilayah kekuasaan Raja Bonerate sedangkan semua pulau yang mempunyai Taka adalah wilayah kekuasaan Panglima Menteng. Penentuan ini dilakukan dengan melempar batu...”

Panglima Menteng inilah yang kemudian memerikan nama terhadap pulau-pulau di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Nama-nama pulau dan maknanya dapat dilihat ditabel berikut ini :

No	Nama Pulau	Arti/Makna
1	Pasitallu	Tiga buah pulau pasir
2	Rajuni	Tempat pusat pemerintahan
3	Jinato	Tempat Suku Tobelo yang memiliki sihir dan jin
4	Latondu	Tempat peristiwa karamnya kapal orang Buton
5	Tarupa	Penempatan tawanan berbagai suku
6	Tambuna	Tempat mayat akibat perang dengan Tobelo
7	Belang-Belang	Pulau rekreasi
8	Tinanja	Tempat melaksanakan nazar
9	Lantigiang	Tempat melantik pimpinan
10	Kamase	Tempat pembagian hak atas sumber daya laut
11	Tinabo	Tempat Panglima Menteng pada saat Perang

Data Sekunder 2005 (Indra, 2006 : 60-61)

Panglima Menteng pemanfaatan sumber daya laut diatur sepenuhnya dengan bijaksana. Pengelolaan sumber daya laut dikelola dengan sistem pemanfaatan dan kepemimpinan tradisional. Laut dan sumber daya yang dikandungnya bukanlah milik semua dan dikelola oleh atau untuk semua orang dari mana saja. Seperti yang dipahami dan dipraktekkan penduduk nelayan. Sistem pengelolaan tradisional dahulu Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate adalah milik bersama masyarakat. Masyarakat pada umumnya adalah suku Bajo-Bugis. Sistem ekonomi dengan perikanan sebagai pencaharian pokok yang berada dibawah pengaturan punggawa Laut dan Punggawa Lolo.

Pola yang menerapkan kepemimpinan menurut Indra, (2006 : 61) adalah Punggawa Laut dan Punggawa Lolo. Punggawa laut diberi kewenangan mengatur musim penangkapan, jenis alat tangkap, lokasi dan biota laut yang mau ditangkap. Punggawa Lolo diberikan kewenangan untuk mengumpulkan dan memasarkan hasil tangkapan nelayan kepada para pedagang. Penunjukkan pedagang ini merupakan hasil kesepakatan antara Punggawa Laut dan Lolo sehingga tidak ada nelayan yang bisa memasarkan langsung hasil tangkapannya kepada pedagang begitu pula sebaliknya pedagang tidak bisa langsung membeli kepada nelayan. Apabila terjadi pelanggaran maka akan diberikan sanksi berupa teguran, denda sampai kepada pengusiran dari pulau. Masalah tersebut sudah tercipta kearifan masyarakat dalam melahirkan aturan adat pengelolaan sumber daya laut. Dengan aturan tersebut pemanfaatan secara berkelanjutan dapat dilakukan karena adanya pengaturan tentang musim, lokasi, alat tangkap dan biota laut. Dampaknya dapat mempertahankan populasi ikan dan biota laut di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate senantiasa terjaga karena tidak ada eksploitasi berlebihan.

Bersamaan dengan waktu perubahan pola Punggawa Laut dan Punggawa Lolo berubah sekitar tahun 1951. Menurut informan H. Ong (70 tahun) bahwa sejak pemberontakan DI/TII masyarakat di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate banyak yang mengungsi. Selain itu, setelah kembali masyarakat ke pulaunya diikuti banyaknya pedagang dan nelayan dari luar

yang mempengaruhi pola pengelolaan. Perubahan pola tersebut menjadi Punggawa dan Sawi sampai sekarang masih ada.

Punggawa-Sawi mengelola sumber daya laut tidak lagi berdasarkan ketentuan dalam penangkapan ikan tapi lebih cenderung eksploitasi. Punggawa-Sawi lebih pada nilai ekonomi yakni produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Pengaturan penangkapan hanya pada kondisi cuaca atau musim.

2. Peran Pemerintah

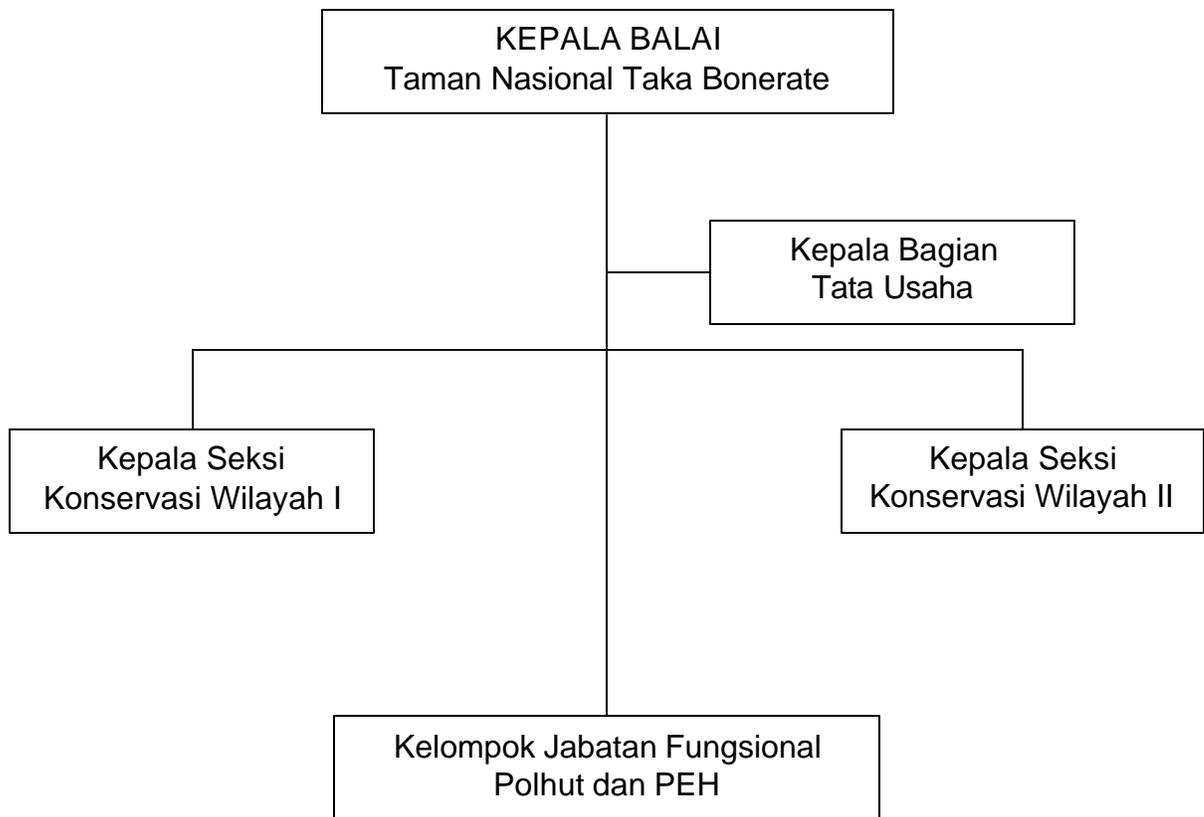
Dalam pengelolaan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate dibentuk unit teknis dengan menerbitkan SK Menteri Kehutanan No 185/Kpts-II/1997 tanggal 31 Maret 1997. Mengalami perubahan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 6186/Kpts-II/2002 menjadi Balai Taman Nasional Tipe C yakni tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional.

Organisasi Balai Taman Nasional Taka Bonerate terbentuk sesuai SK Menteri Kehutanan No. 6186/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional. Berdasarkan SK tersebut Balai Taman Nasional Taka Bonerate mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ekosistem Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate dalam rangka konservasi sumber daya alam berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Balai Taman Nasional Taka Bonerate dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang secara fungsional dibina oleh Direktorat Hutan dan Konservasi Alam. Secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan

Hutan dan Konservasi Alam, khususnya yang berhubungan dengan keproyekan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan selaku Koordinator Penyusunan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Depertemen Kehutanan di Sulawesi Selatan.

Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Taka Bonerate.



Sumber : Balai Taman Nasional Taka Bonerate, Tahun 2006

Dalam pelaksanaannya pengelolaan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate telah dibagi kedalam zona-zona, yakni Zona Inti, Zona Pemanfaatan dan Intensif Tradisional, dan Zona Cadangan.

a. Zona Inti

Zona inti adalah daerah dalam Taman Nasional yang mutlak dilindungi dengan tujuan untuk perlindungan terhadap flora dan fauna khas, endemic dan terancam punah serta peka. Zona inti Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate meliputi, antara lain :

- a) Perairan dan Pulau Latondu Kecil (perlindungan karang)
- b) Perairan dan Pulau Tinanja (Perlindungan ikan karang)
- c) Perairan dan Pulau Ampalassa (Perlindungan Penyu, Burung dan Flora Darat).
- d) Perairan Taka Balalong Timur dan Taka Kumai Barat (Perlindungan Karang dan anggang laut.

b. Zona Pemanfaatan Tradisional dan Intensif

Zona pemanfaatan tradisional adalah daerah dalam Taman Nasional yang dialokasikan untuk mempertahankan hubungan tradisional dan adanya ketergantungan masyarakat terhadap potensi alam Taman Nasional. Zona Pemanfaatan Tradisional meliputi, antara lain :

- a) Perairan Taka Gantarang
- b) Perairan Taka Lamungan

- c) Perairan Taka Sepe
- d) Perairan Taka Bongko
- e) Perairan Taka Tros

Zona Pemanfaatan Intensif adalah daerah Taman Nasional yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk jasa lingkungan seperti pariwisata, pendidikan, penelitian, serta menunjang budidaya. Zona Pemanfaatan intensif meliputi, antara lain :

- a) Perairan dan Pulau Lantigian
- b) Perairan Taka Sepe
- c) Perairan Taka Sileba
- d) Perairan dan Pulau Tinabo Kecil

c. Zona Cadangan

Zona Cadangan adalah daerah Taman Nasional yang diperuntukkan untuk penyelamatan potensi alam Taman Nasional dari pengelolaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dimana data dan informasi potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya belum diketahui secara memadai dan menyeluruh. Zona cadangan adalah Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate meliputi seluruh area di luar Zona Inti, Zona Pemanfaatan Intensif dan Zona Pemanfaatan Tradisional.

3. Peran NGO

a. COREMAP Dengan Program MCS (*Monitoring, Controlling, and Surveillance*)

Kehadiran COREMAP sebagai program yang bertujuan mengambil dan mempertahankan status baik itu fungsi atau manfaatnya agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bijaksana dan berkelanjutan. COREMAP menempatkan posisi yang sebenarnya bagi posisi masyarakat yakni sebagai subyek atau aktor strategi dalam berbagai proses pembangunan termasuk pengelolaan terumbu karang. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yang berbasis masyarakat. Kekayaan dan potensi masyarakat akan direvitalisasi kembali menjadi dasar utama dalam memformulasikan segala instrument penting pengelolaan sumber daya terumbu karang.

Sejak tahun 1995, Program COREMAP mulai berlangsung. Salah satu bagian Program COREMAP yang sangat terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate adalah MCS (*Monitoring, Controlling, and Surveillance*). COREMAP secara nasional ada di beberapa daerah yang masuk kedalam program meliputi Riau, Irian Jaya, Sulawesi Selatan, dan NTT. Program COREMAP meliputi tentang pengelolaan terumbu karang agar dapat lestari.

COREMAP Pusat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : *Pertama*, bagian pelayanan masyarakat yang tugasnya membuat reklame tentang penyalahgunaan terumbu karang. *Kedua*, bagian pengembangan CIRTC (*Corel Reef Information and Training Centre*), yang mempunyai tujuan untuk menginformasikan dan pelatihan terumbu karang. *Ketiga*, bagian CBM (*Community Based Management*) yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat dalam aspek ekonomi. *Keempat*, bagian (*Monitoring, Controlling, and Suevallance*) yang bertujuan melakukan penegakan hukum, pengawasan dan kontrol di masyarakat.

Pada tahun 2002 Pokja dan MCS berdiri sendiri dan saling meningkatkan sistem kerja masing-masing. Setelah terpisah, MCS lebih mudah melakukan perumusan program kerja sesuai wewenangnya. MCS dikaitkan dengan perikanan dan terumbu karang dipahami sebagai mengoptimalkan program berbasis masyarakat dengan memperkuat dan perluas pelibatan masyarakat dalam pengawasan terumbu karang. Dalam pelaksanaannya tiga aspek yang menjadi sasaran MCS, yakni :

- *Monitoring*, merupakan proses pendataan sumber daya perikanan. Melakukan pemantauan, pencatatan dan merumuskan pada tingkat hirarki. Penjaga karang (*Reef Watcher*) direkrut dari masyarakat. Mendata jumlah kapal yang beroperasi pada wilayah tertentu, mendata jenis alat tangkap dan mendokumentasikan posisi, jumlah, ukuran, alat tangkap yang selanjutnya dianalisa.

- *Controlling*, melakukan pengawasan pelaku pemanfaatan pada perairan tertentu, seperti izin operasi, kapasitas produksi, lokasi tangkapan, dan pemeriksaan atribut lainnya.
- *Surveillance*, merupakan proses penindakan jika ada pelaku pemanfaatan melanggar atau beroperasi tidak memiliki izin untuk melakukan pencarian ikan.

Prakteknya melakukan pendekatan legal ataupun pendekatan yang berbasis masyarakat. Pendekatan legal yang dimaksud adalah menjadi sebagai wadah koordinasi dari berbagai institusi yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan kelestarian alam. Menurut ungkapan hasil wawancara beberapa informan menyebutkan adanya beberapa institusi yang mempunyai wewenang yang tumpah tindih. Seperti Pemerintah Desa dan perangkatnya, Aparat Kodim dengan Babinsa, Polres dengan Binmas, BKSDA dengan Jagawana dan Perikanan. Namun, kemudian semua itu diwadahi melalui koordinasi MCS.

Banyaknya kewenangan terhadap Taman Nasional Taka Bonerate terkadang dalam menangani kasus pemboman dan pembiusan misalnya kadangkala para aparat ditingkat bawah disinyalir ikut terlibat. Masing-masing mempunyai kewenangan dari berbagai institusi masih membuat kinerja dari MCS sendiri belum maksimal. Belum ada kesamaan pemahaman dan persepsi yang menghambat proses penegakan hukum.

Saling mengklaim dan melempar tanggung jawab berakibat buruk dalam pelaksanaan teknis lapangan. Lanjut yang dikutip dari hasil wawancara mantan salah satu pengurus MCS (Aft ; 46 tahun), sebagai berikut :

'...sebenarnya disitu kesulitannya karena masing-masing masih mengklaim kewenangan, mestinya kalau ada institusi tidak punya kewenangan dengan kasus jangan dipaksakan ada hubungannya dengan institusi tersebut..'

Istitusi yang menjadi anggota koordinasi MCS setiap bulannya melakukan rapat dan diminta pertanggungjawaban masing-masing karena mempunyai wakil institusi di struktur MCS. Namun, perwakilan MCS tidak bisa membatasi kewenangan dari institusi-institusi yang ada.

MCS dalam praktek melakukan monitoring dan kontrol aktifitas yang dilakukan nelayan khususnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara rutin. Setiap dua kali dalam sebulan melakukan patroli dan semua aparat dan institusi dilibatkan. Dilakukan dengan mengelilingi semua daerah yang rawan dan operasi bersifat rahasia. Tetapi dalam operasi yang dilakukan MCS selalu tidak mendapat hasil maksimal. Ada anggapan bahwa sebelum melakukan operasi selalu ada kebocoran di nelayan.

Pendekatan berbasis masyarakat yang dilakukan dengan merekrut beberapa nelayan untuk menjadi *Reef Watcher*/pengawas karang sebagai salah satu solusi. Pengawas karang bertugas untuk menyerap berbagai informasi yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan

oleh masyarakat. Pengawas karang ini melakukan operasi secara rutin disamping melakukan aktifitas kesehariannya sebagai nelayan. Proses pengangkatan tersebut melalui proses usul melalui rapat secara ketat oleh masyarakat. Masing-masing desa terpilih dua orang.

Setelah berjalan, petugas ini terlibat dalam hal administrasi dengan membuat laporan, pelaksanaan tugas yang prosedural berkoordinasi dengan pihak Jagawana dan Kepala Desa. Pengawas karang sebagian merasa kesulitan dalam menjalankan tugas dengan diharuskannya membuat laporan secara administrasi. Sehingga mereka meluangkan waktu banyak demi membuat laporan secara tertulis.

Fungsinya yang kental dengan hal-hal keamanan yang akhirnya menyebabkan interaksi dan komunikasi dengan masyarakat yang mewakilinya mulai kendor. Kondisi ini memunculkan efek negative yang sangat mempengaruhi persepsi masyarakat yang keliru terhadap pengawas karang. Masyarakat menganggap bahwa pengawas karang Pulau Rajuni sebagai mata-mata orang luar atau sebagai tukang lapor.

Pengawas karang tetap melakukan tugasnya walau mendapat ancaman dan teror dari masyarakat yang tidak senang. Pada tahun berikutnya banyak kasus yang didapat oleh pengawas karang yang dilaporkan ke Jagawana dan diproses lebih lanjut.

b. LP3M Dengan Program CBM (*Community Based Management*).

Bagian yang terintegrasi dalam program yang dilaksanakan oleh COREMAP adalah CBM (*Community Based Management*) pemberdayaan berbasis masyarakat. Proses pemberdayaan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga LP3M. Program yang dikembangkan adalah mencari potensi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat sebagai pekerjaan alternative. Program CBM ini menjadi penyeimbang dari penegakan hukum. Masyarakat dapat meninggalkan pekerjaan yang melanggar hukum dengan bekerja di pekerjaan alternative tersebut.

Community Based Management dalam prakteknya dilakukan oleh LP3M dengan mencari beberapa alternative yang dapat dikembangkan. Setelah berjalan beberapa lamanya mereka (LP3M) melakukan sosialisasi budidaya rumput laut dan lobster. Seperti halnya di Pulau Rajuni melakukan budi daya rumput laut. Namun, budidaya rumput laut sebagian gagal di setiap pulau begitu pula di Pulau Rajuni. Rumput laut sangat sensitive dengan bahan kimia bius. Disekitar Pulau Rajuni masih ada yang menggunakan bahan tersebut sehingga budi daya rumput laut menjadi gagal. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat (H. Hmd ; 56 Tahun), sebagai berikut :

“...beberapa teman menganggap budi daya rumput laut akan berhasil, kerana pertama kali dilakukan dengan sistem pembibitan yang berjalan 20 hari sangat nampak hasilnya. Namun, minat nelayan belum ada walaupun sudah nampak hasilnya dalam beberapa hari. Nelayan yang sudah melakukan budi daya rumput laut sudah begitu yakin, namun pada hari-hari berikutnya pertumbuhan rumput laut gagal atau mati karena perubahan suhu air lau dan adanya bahan kimia (bius) oleh nelayan...”

Program yang dilakukan LP3M mengalami tantangan dari masyarakat yang tidak mau menerima atau tidak senang. Pihak LP3M tidak hanya berfokus pada rumput laut namun mencari lagi alternative lain. Seperti pembibitan Sisik dan Lobster. Pembibitan budi daya ini memerlukan pengetahuan ekstra sehingga masyarakat kewalahan melakukannya.

Namun, bagi warga dari Kampung Bajo Rajuni kehadiran LP3M dengan Proyek CBM-COREMAP-nya ditanggapi positif, karena mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk nelayan, yang selama ini merasa banyak diperlakukan kurang adil oleh orang-orang dari kelas pengusaha dan kalah dalam persaingan perebutan sumberdaya laut secara bebas. Seperti menurut hasil wawancara (As ; 60 tahun), sebagai berikut :

”...LP3M niatnya baik :penyelamat laut di kawasan ini, seandainya tidaka ada LP3M bagaimana kerusakan terumbu karang, ikan dan segala yang hidup di situ..”

Pengelolaan pemanfaatan sumber daya laut yang menyerupai sistem pengelolaan tradisional yang disusun bersama, tokoh

masyarakat dan LP3M. Penduduk nelayan diberikan pelatihan keterampilan dan diberi kebebasan mengembangkan usaha atau kegiatan ekonominya sepanjang tidak melanggar peraturan. Sementara itu, nelayan dari luar tidak diberikan keleluasaan melakukan penangkapan yang dibatasi pada yang dianggap layak saja. Nelayan tidak diperbolehkan menjual tangkapannya secara langsung kepada pedagang dari luar tetapi kepada pedagang lokal, nantinya pedagang lokal tersebut yang meneruskan kepada pedagang-pedagang dari luar.

Konsep mekanisme tersebut, menurut informasi dimaksudkan agar keluarga-keluarga nelayan mendapatkan akses bagi pembangunan usaha dan peningkatan pendapatan dengan tetap memberi peluang bertahannya pengembangan usaha pedagang lokal. Adanya jaminan kepastian akan komoditi dagangan, sebab peranan pesaing dari luar dirubah menjadi mitra usaha.

Selain itu, dijelaskan pula prosedur yang harus dilalui seorang nelayan dari luar untuk mendapatkan izin operasi dalam kawasan. Nelayan dari luar (perorangan atau perkelompok) pertama melapor ke Kepala Dusun, kemudian ke kelompok konservasi (bentukan LP3M). Setelah diberi penilaian/kelayakan, lalu diteruskan ke Forum Desa (Unsur-unsurnya : Tokoh masyarakat, kelompok koperasi, kepala dusun, Binmas, Babinsa, Jagawana) dan terakhir ke Kantor Desa. Memang

kelihatan rumit, namun urusan izin kelayakan beroperasi di tingkat desa dapat diselesaikan dalam sehari atau paling lambat tiga hari.

B. Pemanfaatan Sumber Daya Laut Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate selama ini dilakukan oleh berbagai pihak. Nelayan yang menjadi inti pengelolaan sumber daya laut tersebut untuk menunjang kehidupan ekonomi sehari-harinya, baik itu kebutuhan subsistem, maupun kebutuhan usaha/kegiatan perekonomian. Menurut informan bahwa bukan hanya masyarakat lokal yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate tapi juga nelayan-nelayan dari luar/pendatang. Nelayan dari luar/pendatang tersebut berlangsung sejak tahun 1980-an, bahkan jauh sebelumnya. Nelayan dari luar/pendatang fokus pencarian mereka terhadap Ikan, Teripang, Kerang-Kerang, Lobster, Penyu, dan sumber daya laut lainnya yang bernilai jual. Sejak tahun 1990-an jumlah nelayan dari luar semakin meningkat yang berasal dari Kabupaten Sinjai, Pangkep, Takalar, Bantaeng, Selayar, Bone, Kota Makassar, Buton, NTT, dan Bali.

Konsekuensi tingginya tingkat eksploitasi yang dilakukan masyarakat, baik nelayan lokal maupun nelayan pendatang mengakibatkan sumber daya akan mengalami kerusakan, kehancuran, yang pada akhirnya akan mengalami kemusnahan. Untuk mempertahankan fungsi dan manfaat

terumbu karang yang ada di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate maka Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pengelolaan sumber daya laut di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate dilakukan baik oleh nelayan lokal maupun nelayan pendatang dengan berbagai cara. Nelayan lokal dengan cara tersendiri dan nelayan pendatang yang lebih banyak mempengaruhi nelayan lokal.

1. Masyarakat Lokal.

Masyarakat lokal mayoritas sebagai nelayan sehingga dalam tulisan disebut nelayan lokal. Nelayan lokal dalam Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate sama halnya dengan nelayan di pesisir pulau-pulau di Indonesia yang umumnya menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Hasil tangkapan kemudian dijual dan dikonsumsi untuk rumah tangga sebagai lauk pauk. Hasil penjualan menurut informan digunakan untuk kebutuhan bahan pokok lain sehari-hari. Nelayan yang memiliki kelebihan hasil usaha akan dijadikan modal usaha perkonomian lain yang dijalankan.

Seperti halnya nelayan Pulau Rajuni hasil nelayannya atau tangkapannya dijadikan modal untuk berjualan atau buka kios kebutuhan pokok. Sekitar tahun 1990-an pemanfaatan sumber daya laut diakui sebagai sistem turun temurun dari nenek moyang mereka bahkan sekarang masih ada. Namun sekarang dengan maraknya nelayan dari luar menambah persaingan dan konflik pengelolaan sumber daya laut. Banyak nelayan yang

menggunakan penangkapan dengan alat bahan yang illegal. Nelayan lokal melakukan beberapa cara tersendiri, seperti berikut ini :

a. Nelayan Pancing.

Jenis pancing yang digunakan terdiri berbagai bentuk dan jenis. Pancing yang digunakan seperti Pancing Rawe, Panci Rinta', Pancing Ladung dengan ukuran mata kail yang berbeda-beda menurut jenis ikan yang akan ditangkap. Salah satu alat tangkap bagi nelayan adalah pancing yang digunakan sebagian besar nelayan di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Alat tangkap yang dianggap tradisional ini digunakan untuk menangkap ikan Sunu dan Karapu dalam kondisi masih hidup. Ada dua tehnik dalam memancing ikan karang yang dilakukan adalah : *pertama*, tehnik memancing dengan perahu dalam keadaan berlabu/diam dan *kedua*, tehnik memancing dengan keadaan perahu bergerak secara mondar-mandir.

Tehnik pertama disebut bisaa yang sifatnya pasif, kemudian tehnik yang kedua disebut tehnik "*kedo-kedo*" yang bergerak secara dinamis. Tehnik kedua dianggap lebih produktif, namun hanya sedikit yang dipraktekkan karena memerlukan tenaga yang lebih atau sekarang menggunakan bahan bakar yang banyak untuk mesin katinting atau joloro. Tehnik bisaa banyak dipraktekkan nelayan karena penggunaannya cukup hemat tenaga dan operasionalnya namun hasil minim.

Tehnik pancing dianggap sebagai tehnik penangkapan ikan yang tidak merusak ekosistem terumbu karang. Pengoperasian pancing tidak mengganggu terumbu karang atau membahayakan. Dianggap hanya menangkap ikan-ikan yang dianggap besar. Namun, tehnik ini tidak efektif lagi dalam penangkapan ikan, seperti hasil wawancara dengan informan bekerja sebagai nelayan pancing (H. DL ; 45 tahun), sebagai berikut :

“...sekarang ikan kurang, dengan menggunakan pancing banyak membuang waktu, tenaga, dan bahan bakar. Dengan memancing nelayan hanya mengharapkan dari rezki saja...”

Diakui juga oleh pemberi modal bahwa memang nelayan pancing sangat susah mencari hasil tangkap. Setiap hari mereka harus memohon agar menanggihkan dulu utang mereka. Sehingga pemodal sudah berpikir untuk memberkan modal bagi nelayan pancing. Apabila pada musim tertentu para nelayan pancing tidak bisa melaut. Salah seorang punggawa memberikan informasi (H.SS ; 50 tahun) sebagai berikut :

“...saya dulu sekitar tahun 1990-an sudah memberi modal untuk nelayan pancing apabila mereka meminta dengan perjanjian mereka (nelayan) hasil tanggapannya dijual sama saya dan memang banyak mereka dapat. Namun suda berupa tahun ini mereka jarang memperoleh hasil lagi apalagi mendapat ikan yang nilai ekspor. Mereka tiap hari melaut dan selalu gagal sehingga saya suda merasa atau berpikir untuk memberikan mereka modal...”

Nelayan pancing sangat merasakan betapa susahny mencari ikan sekarang dengan menggunakan pancing yang tidak ada hasil yang didapat cuma capek dan utang. Sehingga banyak teman-teman beralih ke alat penangkap yang illegal yang sudah pasti memperoleh hasil yang lebih banyak dalam waktu singkat. Walau teman-teman mengetahui dampak dari cara tersebut.

b. Nalayan Jaring/Pukat.

Pukat atau jaring sering sekali diganti atau ditukar sesuai penggunaannya. Pukat yang memakai kantong atau tidak kemudian disebut jaring. Sementara jaring insang yang pengoperasiannya secara pasif sering diganti nama pukat. Beberapa jenis pukat atau jaring masih diperbolehkan oleh pemerintah. Termasuk alat pukat atau jaring tradisional yang masih sangat produktif seperti "*kulombi*" (Bugis) dan "*lamba*" (Bajoe), sejenis pukat cincing , "*rengge kareo*" (pukat hiu : Bajoe), "*lanra* " (Makassar), sejenis jaring insang.

Menurut informan sejak dulu sekitar 1980-an orang Flores mengoperasikan *lempira*, sejenis pukat cincing yang berukuran sangat besar. Pada saat bersamaan digunakan pula pukat untuk menangkap cumi-cumi dari Kampung Padang Selayar. Bersamaan dengan nelayan Sinjai mengoperasikan pukat untuk menangkap Lure di bagian Jinato. Kemudian sejak masuk tahun 1990-an nelayan Sinjai datang dengan *gae lampu*.

Jenis pukat atau jaring yang telah disebutkan diatas mempunyai fungsi dan cara penggunaan serata hasil tanggapan berada. *Peratama*, pukat *lambi* pukat tradisional yang tidak mempunyai kantong, berukuran besar dengan panjangnya sekitar 100 depa dan tinggi sekitar 1,5 depa (1 depa = 1,75 cm). kedua ujung pukat ini diikat dengan tali induk yang panjangnya masing-masing mencapai 250 m. Pengoperasiannya rumit dan berat maka diperlukan 2 sampai 3 sampan dengan memakai tenaga 3 sampai 5 orang untuk mengangkat, menurunkan dan menarik tali *lamba* berkeliling. Lokasi operasionalnya disekitar pulau, gusung dan taka pada kedalaman 3 meter.

Nelayan lebih menyukai lokasi-lokasi berpasir dan permukaan dataran dalam mengoperasionalkannya, tetapi karang terdapat dimana-mana maka dapat mempengaruhi kondisi terumbu karang. Berdasarkan informan pengaruh negative dari alat ini kurang berarti lagi terumbu karang, karena akan selalu menghindari karang takut pukatnya tersangkut. Jenis ikan yang ditangkap adalah ikan-ikan belawas, kalaoholong, katamba, baronang, sunu dan lain-lain. Hasil yang bisa diperoleh mencapai 100-500 kg ikan, namun dalam musim badai kurang ikan bisa hanya 5 kg.

Kedua, Jaring hiu (*rongge karoe*) memiliki bentuk teknik mengoperasikannya yang berbeda bisaa disebut sejenis jaring. Panjang jaring ini mencapai ratusan depa sesuai kebutuhan dengan tinggi bisaa

1,5 depa. Ukuran dari mata jaring yang bekisar antara 15 sampai 16 inci yang terbuat dari tali nilon yang besar. Lokasi pemasangan jaring Hiu pada umumnya diturunkan disekitar tubir pada kedalam puluhan meter. Jaring Hiu ini diturunkan dengan alat bantu pernafasan (konpresor).

Pengoperasian jaring Hiu ini sangat berat dan rumit diantara jenis-jenis pukat/jaring lainnya. Jaring dipasang pada sore hari dan diangkat pada malam hari berikutnya. Jaring ini menggunakan perahu jarangka' ataupun *Joloro* dengan memerlukan tenaga sekitar 3 sampai 5 orang. Baroperasinya jaring Hiu ini dapat merusak terumbu karang. Namun menurut informan jaring Hiu ini tidak merusak atau mengganggu terumbu karang.

Ketiga, jaring *lanra* sejenis jaring insang dengan panjang puluhan bahkan mencapai ratusan meter. Pada masyarakat Kawasan Taka Bonerate *lanra* dipasang pada permukaan laut untuk menangkap ikan-ikan kecil terutama *sembilu*. Sehingga jaring ini disebut "*puka sembilu*". Bagi nelayan pancing sunu/kerapu sebagian besar merupakan pengguna *lanra*, karena ikan *sembilu* merupakan umpan dari ikan Sunu/Kerapu. *Lanra* ini merupakan alat yang ramah lingkungan.

Keempat, pukat *Gae* adalah pukat yang sangat besar ukurannya. Menurut informan pukat *Gae* Sekitar tahun 1997 datang ke Kawasan Taka Bonerate dan mulai digunakan oleh nelayan berasal dari NTT dan nelayan berasal dari Kabupaten Sinjai. Kemudian masyarakat di Pulau

Rajuni mengikutinya, pake *gae* merupakan alat tangkap yang bisa menghasilkan ikan yang hasilnya dengan hasil yang lumayan banyak.

Perlengkapan dalam mengoperasikan Pukat *Gae* adalah satu unit motor atau *joloro* untuk mengangkat pukat diperlukan sekitar 10 orang serta satu buah sampan kecil untuk mengangkut lampu-lampu petromaks. Lampu petromaks berfungsi sebagai pengkonsentrasian ikan untuk masuk kedalam jaring pada saat malam hari. Panjang net *Gea* bervariasi mulai 70 meter sampai 200 meter dengan lubang jaring yang cukup rapat yang sama disemua bagian.

Nelayan *Gae* bisaa disebut *pagae* yang bisaa berlansung pada musim timur dari bulan September hingga pertengahan Desember. waktu penangkapan dimulai pada sore hari sekitar pukul 16.00 atau 17.00 *Pagae* segera menuju lokasi tangkapan. Perahu lampu yang bisaa diawali oleh 2 orang sawi, ditempatkan pada lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Punggawa laut yang sudah memperkirakan lokasi yang banyak ikanya. Kapal induk yang membawa pukat dan sawi-sawi lainnya mengambil posisi sekitar 300 hingga 500 meter dari perahu lampu. Pada saat perahu yang membawa lampu memberikan tanda bahwa ikan sudah berkumpul, punggawa lansung mengarahkan kapal dengan kecepatan tinggi untuk mengadakan penangkapan. *Gae* digunakan pada kedalaman 30 meter.

Hasil tangkapan bermacam-macam seperti Ikan Layang, Banjar, Katombong, Simbula, Cakalang, Cumi-cumi, dan masih banyak lagi jenisnya. Hasil tangkapan dimasukkan kedalam peti kemudian *Gae* dirapikan. *Pagae* kembali kepulau untuk menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan yang sudah menunggu dipelabuhan. Lokasi tangkapannya bisaanya dilakukan pada kedalaman 20 meter. Menurut informan pukat *Gae* ini tidak merusak terumbu karang.

Kelima, alat tangkap *Bagang* dimulai sekitar tahun 1980-an. Jenis ini digunakan nelayan di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate yang dibawah pertama kali oleh nelayan dari Kabupaten Sinjai. Sekitar tahun 2000-an baru dipaktekkan di Pulau Rajuni. Menurut seorang punggawa *Bagang* (H. Tjd 40 tahun) dia tertarik menggunakan *Bagang* karena dianggap ramah lingkungan dan tidak merusak terumbu karang, serta menghasilkan tangkapan yang memuaskan. Hasil tangkapan dapat menutupi biaya menyewa dan membayar sawi serta biaya operasional *Bagang* yang dibuat dengan modal kurang lebih dari Rp. 50 Juta dengan memakai atau menggunakan mesin 300 pk, mesin genset 22 pk dan lampu petromaks sekitar 12 buah. Pengoperasian menggunakan *Bagang* memakai sawi minimal 4 sampai 10 orang sawi.

Sama halnya dengan *Gae* nelayan *Bagang*, juga melakukan penangkapan ikan pada musim timur. Sekitar bulan september sampai desember dengan kedalaman air 1.000 meter.

Dari berbagai alat tangkap yang sering digunakan hanya Gaelah yang dilarang pemerintah. Pemakaian alat tangkap Gae yang digunakan nelayan dari luar harus seizin masyarakat dan pemerintah setempat. Kebanyakan nelayan melarang nelayan dari luar yang menggunakan alat tangkap Gae. Seperti hasil wawancara dengan salah seorang informan, nelayan Pulau Rajuni (Brh ; 40 Tahun), sebagai berikut

“...nelayan Gae dari luar tidak bisa kesini, karena mereka bisa memonopoli hasil tangkapan. Sehingga masyarakat akan menganggap tidak adil pada mereka...”

Selain informn dari salah seorang tokoh masyarakat (YY ; 35 Tahun), bahwa :

“...nelayan dari luar yang lolos masuk dengan menggunakan Gae bisaanya ada kerjasama dengan aparat. Kalau masyarakat sendiri melarang keras ada nelayan dari luar yang menangkap ikan dengan memakai alat tangkap Gae. Apabila nelayan yang lolos ditanya kenapa menggunakan Gae katanya ada izin dari aparat. Kalau tanyakan ke aparat yang memberikan izin, maka jawaban aparat tersebut untuk dana pembangunan. Namun, selama ini tidak ada pembangunan desa. Lihat saja mesjid yang dari pertama dibangun begitu-begitu saja...”

Informasi tersebut diatas, mengharapkan adanya aturan yang dapat menyentuh persamaan persepsi masyarakat dan aparat pemerintah. Masyarakat untuk menjaga apabila didukung oleh aturan yang disepakati bersama dan ditaati bersama sehingga tidak mengakibatkan kecemburuan.

c. Nelayan *Bubu'*

Bubu' adalah alat tangkap yang bersifat pasif. *Bubu'* terbuat dari bambu yang diiris tipis-tipis yang kemudian dianyam. Setelah dianyam dibuat atau dibentuk seperti kotak, lalu dibagian tengah samping terdapat lubang masuknya ikan. Tempat masuk ikan dibuat sedemikian rupa sehingga ikan yang masuk tidak bisa lagi keluar.

Dalam prakteknya *Bubu'* menggunakan batu untuk menindisnya. Hal ini berakibat buruk bagi kelestarian alam (terumbu karang). Nelayan tidak menganggap bahwa *Bubu'* dapat berakibat negative dari alat tangkap *Bubu'*. Alat tangkap ini sangat digemari oleh nelayan. Pada tahun 1996 Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar mengeluarkan aturan pelarangan penggunaan alat tangkap *Bubu'*. Kemudian memaksa nelayan untuk tidak menggunakan alat tangkap tersebut menurut informan (YY ; 35 Tahun), sebagai berikut :

“...Pulau rajuni ini dulu orang ramai-ramai memakai *Bubu'* termasuk saya memakai alat tersebut. Jumlahnya sampai puluhan *Bubu'*. Saat Pemerintah melarang langsung mengumpulkan, membakar semua alat tersebut. Sekarang tidak memakai lagi...”

Saat ini nelayan yang masih menganggap bahwa larangan tentang alat tangkap *Bubu'* itu terlalu mengada-ada terpaksa berpindah menggunakan alat pancing. Kemudian diperkenalkan kembali alat

tangkap *Babu' labuh*. *Babu' labuh* adalah bentuk alat tangkap yang berasal dari hasil modifikasi *Bubu'* tindis.

Dengan dilarangnya tradisi alat tangkap tersebut beberapa orang pengusaha punggawa khususnya di Pulau Rajuni mengalami kerugian yang sangat besar. Alat yang dibuat belum memperoleh atau kembali modal sudah disita oleh pemerintah. Seperti salah seorang nelayan bahwa dia memiliki 200 buah *Bubu'* yang baru didatangkan dari Pulau Bonerate habis dihanguskan.

Lain halnya dengan yang diungkapkan salah seorang nelayan *Bubu'* yang tetap menggunakannya walaupun ada larangan. Nelayan tersebut memiliki akses terhadap aparat penegak hukum sehingga bebas melakukan atau menggunakan alat *Bubu'*. Namun, bukan alasan aturan sehingga dia berhenti menggunakan akan tetapi karena nilai religus (music) di dasar laut. Seperti kutipan pernyataan hasil wawancara dengan informan (Mhd ; 40 tahun), sebagai berikut :

”...sekitar 3 tahun yang lalu saya adalah nelayan pancing, namun sebagai nelayan pancing sangat minim penghasilan maka saya mencoba menggunakan *Bubu'*. Saya mendekati dan meminta izin pada aparat penegak hukum, sehingga saya bebas menggunakan dengan sahabat saya. Ketika suatu waktu saya melakukan atau menurunkan *Bubu'* bersama teman pada saat itulah teman saya mengalami hal yang diluar akal (kemasukan jin/setan didasar laut). Saya membawa teman tersebut kedarat tanpa sadar yang akhirnya meninggal dunia. Sejak itulah saya berhenti menjadi nelayan dengan menggunakan *Bubu'*...

Kesadaran nelayan masih kurang hal ini disebabkan salah oleh faktor keterampilan dan kreatifitas sebagai nelayan. Masyarakat nelayan di Pulau Rajuni cenderung ingin cepat dan mudah mendapatkan hasil.

Dampak negative penggunaan *Bubu'* yang dapat merusak terumbu karang dibantah oleh beberapa informan. Seperti yang mereka katakan bahwa tidak siapapun yang bisa mencabut karang walaupun menggunakan alat linggis.

Bubu' bisaanya menghasilkan ikan hidup yang nilai jualnya cukup tinggi. Alat *Bubu'* menghasilkan tangkapan seperti : Ikan Sunu, Karapu, dan semua jenis ikan karang yang ditangkap dalam keadaan hidup. Ukuran ikan pun dipilih sesuai lubang tempat masuknya, bila ikan kecil maka dapat keluar.

d. Nelayan Bom/Bius

Sekitar tahun 1995-1999 alat tangkap Bom dan Bius sudah mulai dikenal oleh nelayan. Bom dan Bius merupakan alat tangkap yang ilegal yang masih marak masyarakat menggunakan alat tersebut. Masih seringnya nelayan lokal dan nelayan pendatang menggunakan alat tangkap ilegal disebabkan oleh faktor masih longgarnya penegakan aturan dipihak terkait. Luasnya lokasi lautan yang menyebabkan minimnya kontrol oleh aparat, dan kesadaran nelayan yang masih rendah. Nelayan memahami apa yang mereka perbuat, namun tuntutan

ekonomi sehingga menggunakan alat tangkap yang dilarang untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Menurut salah seorang informan (H. Abd ; 45 tahun), sebagai berikut :

“...ada kata-kata orang tua kami sejak dulu yaitu selagi masih ada daun di darat maka begitu pula ikan di laut. Artinya biarpun menggunakan apa saja untuk tangkap ikan, ikan dilaut tidak akan habis. Walaupun karang rusak tetap ikan akan berkembang biak. Tuhan menciptakan alam dan isinya untuk dimanfaatkan oleh umatnya. Jadi, tidak ada yang dapat menghalangi kami mencari ikan bagaimana pun caranya...”

Nelayan mengetahui segala resiko dengan menggunakan bahan terlarang Bom dan Bius yang dapat mematikan, merusak terumbu karang, dan merusak habitat. Masyarakat mengetahui dari berbagai promosi dan kampanye yang dilakukan Pemerintah, LSM, dan media lain.

Pemerintah dalam menangani pelanggaran tentang bahan terlarang menggunakan berbagai Undang-undang baik itu Undang-undang Perikanan, PERDA, atau Undang-undang Konservasi. Akan tetapi disamping itu pula tingkat pelanggaran penggunaan bahan terlarang oleh nelayan semakin meningkat. Sekitar tahun 1999-2000 banyak program yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Selayar melalui surat edaran tentang pelanggaran penggunaan alat tangkap yang merusak serta kontrol yang dilakukan aparat keamanan, dapat mengurangi tingkat pelanggaran sekitar tahun 1999.

Setelah itu Program Pemerintah Kabupaten Selayar berakhir penggunaan bahan terlarang meningkat lagi. Tidak seriusnya penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran, termasuk kasus pelanggaran yang dilakukan nelayan dari luar/pendatang, sehingga nelayan lokal menentukan sikap tidak simpati pada aparat. Akibat yang muncul adanya kecemburuan nelayan lokal terhadap perlakuan nelayan pendatang yang melanggar.

Praktek alat tangkap deskriptif yang paling sering digunakan adalah aktifitas bom rakitan/buatan. Bahan utama dari bom rakitan adalah detonator, tepung menyerupai pupuk urea, sumbu dan tabung. Bahan-bahan diperoleh secara sembunyi-sembunyi. Detonator bahan yang diperoleh dari industri atau gudang mesiu, tepung bisaanya dibawah oleh penyeledup dari Malaysia yang masuk melalui WAKATOBI (Wanci, Kalidupa, Tomia, dan Buton). Bahan sumbu sangat mudah didapatkan warung atau kios, kemudian botol minuman, botol plastic, atau kaleng minuman yang mudah didapatkan. Pemboman bisa dilakukan pada siang dan malam hari. Pelaksanaan diperlukan 5 sampai 7 orang dengan menggunakan perahu bermotor dan kompresor untuk membantu menyelam.

Bius atau bahan kimia beracun (*potassium sianida*) bisa didapatkan dengan mudah dipenjual, toko, atau kios bebas sebagai bahan mengkilapkan emas, perak atau tembaga. Kegiatan ini dalam

prakteknya dibutuhkan 1 sampai 3 orang dengan menggunakan transportasi laut yang sangat cepat. Dilakkan pada siang hari dengan bantuan kompresor untuk menyelam.

Akibat penggunaan Bius bisa fatal bagi kelestarian alam. Merusak ekosistem dan keseimbangan ekosistem dilaut. Semua jenis binatang laut, ikan kecil-kecil dan habitat lainnya mati apabila terkena Bius.

2. Nelayan Pemandang

Sejak tahun 1980-an bahkan sebelumnya nelayan-nelayan dari berbagai tempat datang ke Kawasan Taka Bonerate untuk mengambil sumber daya laut. Nelayan-nelayan tersebut mengambil atau menangkap sumber daya laut seperti Penyu, Ikan, Teripang, Karang-karang, Lobster dan lain-lain yang ada di Kawasan Taka Bonerate. Sekitar tahun 1990-an nelayan-nelayan yang semakin meningkat karena naiknya harga ikan hidup, Lobster hidup dan Teripang untuk di ekspor.

Para nelayan sekitar Kawasan Taka Bonerate tidak menginginkan datangnya nelayan-nelayan dari luar tersebut yang memanfaatkan sumber daya laut. Namun nelayan-nelayan ini memberikan masukan bagi pemerintah desa sehingga memperoleh izin dari aparat pemerintah. Hal menjadi kesepakatan tertulis bagi nelayan lokal dengan pendatang. Dari isi perjanjian mereka salah satu syarat bagi nelayan pendatang harus memberikan sebagian keuntungan dari hasil tangkapnya untuk kas desa yang akan digunakan untuk pembangunan pra-sarana desa.

Kewenangan Pemerintah Desa untuk melakukan pendataan kepada nelayan pendatang yang masuk ke wilayah mereka dengan sistem penjualan pass/tiket. Dijadikan alasan bagi sebagian nelayan untuk menerima nelayan pendatang dengan alasan uang pembelian pass/tiket tersebut dapat dijadikan kas desa nantinya, namun banyak anggapan dari informan, bahwa kas Pemerintahan Desa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Nelayan-nelayan yang datang dari luar Kawasan Taka Bonerate berasal dari nelayan Kabupaten Sinjai, Bone, Pangkep, Takalar, Benteng, Bulukumba, Selayar, Kota Makassar, Sulawesi Tenggara, NTT dan Bali.

a. Nelayan Berasal Dari Kabupaten Sinjai.

Nelayan dari Kabupaten Sinjai adalah nelayan berasal dari luar Kawasan Taka Bonerate yang pertama kali masuk. Kemudian secara intensif melakukan penangkapan dan pemanfaatan sumber daya laut seperti mencari Teripang, Ikan dan sumber daya laut lainnya. Pada tahun 1999 sampai sekarang nelayan *Gae* pukot dasar datang dari Lappa Sinjai yang mengajak masyarakat atau nelayan lokal untuk bekerja sama.

Masuknya alat tangkap *Gae* membuat nelayan lokal merasa khawatir akan persaingan mendapatkan ikan terutama jenis Simbula yang merupakan umpan pancing Sunu/Kerapu. Tapi ada beberapa Pulau yang menerima kedatangan mereka seperti Pulau Jinato, Tarupa,

Tambuna. Seperti yang diungkapkan informan (H.M ; 58 tahun), sebagai berikut :

“...pagae yang 2 atau 3 dari Sinjai yang banyak beroperasi sekitar Kawasan operasi mereka dibatasi pada lokasi-lokasi dalam yang tidak digunakan oleh nelayan pancing lokal. Pagae ini bekerjasama dengan punggawa sebagai pengelola dan pedagang dari pulau ini yang mengangkut ikan-ikan segar kepelelangan Lappa Sinjai. Lagi pula sebagian ikan-ikan Simbula tangkapan Gae diberikan kepada pemancing sebagai umpan, sehingga mereka tidak susah lagi mencari umpan...”

Adanya pihak yang pro dan kontra dengan kehadiran Pagae menyebabkan terjadinya konflik kepentingan pengelolaan sumber daya laut.

Nelayan dari Sinjai ini selain sebagai Pagae mereka juga mengambil Terimpan dengan melakukan pemboman dan pembiusan di Kawasan Taka Bonerate. Menurut dugaan informasi dari informan, kemungkinan nelayan Sinjai bekerja sama dengan oknum pihak keamanan yang bertugas di Kawasan Taka Bonerate dengan memberi upetih. Diduga pula hilangnya beberapa Kima diduga nelayan Sinjai pelakunya.

b. Nelayan Berasal Dari Ibu Kota Kabupaten Selayar.

Jarak yang begitu dekat dengan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate mengakibatkan nelayan dari Selayar di luar Kawasan Taman Nasional sering pula masuk untuk menangkap dan memanfaatkan sumber daya alam. Nelayan dari Selayar berasal dari pulau-pulau

seperti Pulau Kayuadi, Jampea, Bonerate, Appatanah yang merupakan pulau yang sangat dekat dengan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.

Nelayan dari Selayar di luar Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate menggunakan alat tangkap bervariasi. Seperti nelayan Kayuadi, Jampea dan Appatanah sebagian besar menggunakan alat pancing dan mencari teripang.

Berbeda halnya nelayan berasal dari Padan, mereka cenderung menangkap Cumi-cumi di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate dengan menggunakan Bagang. Nelayan dari Padang biasanya dalam satu Bagang beranggotakan 5 sampai 7 orang dengan terdiri beberapa Bagang dalam beroperasi. Mereka melakukan pencarian pada malam hari dan dilakukan pada laut dalam.

c. Nelayan Berasal Dari Kota Makassar dan Kab. Pangkep.

Nelayan dari Kota Makassar dan Kab. Pangkep masuk ke Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate memanfaatkan sumber daya laut mulai sekitar tahun 1990-an. Mereka melakukan perjalanan cukup jauh.

Nelayan Kota Makassar dan Kab. Pangkep mereka lebih banyak mencari ikan hidup seperti Sunu dan Karapu. Selain Sunu dan Karapu mereka juga menangkap ikan besar lainnya dengan menggunakan alat tangkap pancing *Tonda*, *Rinta*, *Lanra* dan *Kedo-kedo*. Biasanya mereka

menggunakan waktu yang cukup lama sepanjang tahun. Waktu istirahat atau kembali hanya dilakukan pada tahun baru islam atau tahun bau masehi. Setelah itu mereka kembali lagi ke Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate untuk mencari hasil laut. Nelayan ini berasal dari Pulau Barang Caddi, Barang Lompo, dan Pulau-pulau Pangkep.

d. Nelayan Berasal Dari Kabupaten Buton Sul Tra.

Nelayan dari Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara mereka lebih banyak menggunakan *Bubu' tindis* dalam menangkap ikan. Sekitar tahun 1998 mereka sering melakukan kerja sama dengan dengan pengusaha dan nelayan Pulau Rajuni. Bisaanya mereka dijadikan anggota oleh para pengusaha/punggawa atau dengan diberikan modal usaha untuk melakukan usaha sendiri.

Nelayan dari Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara datang pada musim timur dan kembali sekitar musim barat. Alat yang digunakan adalah *Bubu' tindis* disekitar taka-taka dengan kedalaman sekitar 3 sampai 4 meter. Bentuk alat tangkap *Bubu' tindis* yang dipakai menggunakan batu untuk menindis *Bubu'* tersebut. Sehingga alat ini merusak terumbu karang. Mereka pula yang memperkenalkan alat ini pada nelayan lokal.

e. Nelayan Dari Provinsi NTT.

Sejak tahun 1996 nelayan dari NTT kabupaten Maumere, Buring masuk mencari ikan dan sumber daya laut lainnya di Kawasan Taman

Nasional Taka Bonerate. Mereka menggunakan pukat lampara. Nelayan dari NTT kurang sopan bahkan melakukan ancaman pada aparat dan nelayan lokal apabila mereka di ganggu atau hendak diperiksa. Dalam melakukan operasinya bisaa memakai alat tangkap Pancing, Panah, Bom, dan Lampara.

Selain nelayan dari Maumere, Kobaena ada juga dari During yang menggunakan alat tangkap Lampara. Mereka melakukan operasi secara berkelompok antara 5 sampai 7 kelompok atau kapal. Mereka juga bisaa menggunakan *Gae*, namun sejak dilarang mereka tidak menggunakan lagi.

f. Nelayan Berasal Dari Bali.

Nelayan dari Pulau Bali mulai muncul sejak tahun 1995-an. Nelayan dari Pulau bali cenderung mencari ikan hias dengan menggunakan bahan kimia (Bius). Selain ikan hias mereka juga mengeksploitasi Penyu dan sumber daya lainnya. Penyu bisaa mereka peroleh dari nelayan lokal. Namun, sekarang sangat ketat bagi nelayan dari Pulau Bali melakukan pencarian ikan hias dan Penyu di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.

BAB VI

ANALISA DAMPAK PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT DI KAWASAN TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE

Pengelolaan sumber daya laut di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate yang dilakukan masyarakat lokal atau disebut nelayan lokal maupun nelayan pendatang dari segala daerah. Pengelolaan dapat mengakibatkan beberapa pengaruh terhadap terumbu karang. Baik pengaruh terhadap lingkungan, ekonomi, dan konflik. Demikian pula perubahan pola pikir masyarakat dapat berubah melalui proses penyadaran oleh berbagai pihak.

A. Lingkungan.

Meningkatnya kasus pelanggaran yang dilakukan nelayan lokal maupun pendatang di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate berdampak pada kerusakan terumbu karang. Selain terumbu karang, ekosistem lain juga yang ada di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate akan ikut rusak. Kasus seperti pemboman dan pembiusan merupakan masalah yang sangat serius. Kelestarian terumbu karang yang memiliki fungsi sebagai tempat berkembabiakannya ikan, penahan ombak dan memiliki daya tarik akan musnah.

Dampak lain yang bisa saja terjadi akibat dari kegiatan deskrutif tersebut yang dilakukan nelayan akan merusak ekosistem yang tidak mungkin akan musnah. Bukan saja kerusakan pada terumbu karang tetapi segala bentuk

praktek alternatifn pencarian akan tidak berhasil. Seperti halnya budidaya rumput laut, Sisik maupun Lobster tidak akan hidup atau berkembang biak baik masih ada pelaku penggunaan bius. Maka semakin sulit untuk mencari model pencaharian alternatif apabila sumber daya laut tidak lagi mendukung.

B. Sosial Ekonomi.

Berbagai praktek yang dilakukan nelayan, MCS, CBM maupun pihak lain tentu saja berakar pada permasalahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat menggantungkan hidupnya dilaut dan dipengaruhi oleh sumber daya laut, maka menimbulkan dampak seperti :

1. Kemakmuran.

Kemakmuran yang dirasakan mungkin hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat nelayan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Masyarakat yang mempunyai modal (uang) besar seperti pengusaha/punggawa. Apa saja perubahan kebijakan pemerintah mereka bisa mengikuti dengan mengganti alat tangkap misalnya, seperti pengusaha yang dulu menggunakan *Bubu'* setelah dilarang mereka dengan enteng atau cepat mengganti dengan alat tangkap Bagang. Nelayan yang memiliki kekuatan dan keberanian menggunakan bahan peledak dan bius akan tetap hidup dengan kemakmuran. Lalu bagaimana dengan Nelayan Pancing secara tradisional ?. mereka yang akan menanggung kebijakan dengan kurangnya modal usaha.

2. Kemiskinan.

Nelayan tradisional sangat susah mengganti alat tangkap mereka untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Kebijakan yang membatasi mereka untuk tetap seperti itu atau ketidakadilan penegasan hukum terhadap aturan yang telah dikeluarkan. Larangan terhadap beberapa alat tangkap mengakibatkan nelayan lokal hanya menggunakan alat tangkap pancing yang sangat sederhana. Nelayan dari luar semakin banyak yang masuk ke Kawasan Taka Bonerate dengan menggunakan alat tangkap yang produktif. Maka semakin mempersulit bagi nelayan lokal untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal.

Berbagai persoalan yang kompleks bagi nelayan lokal sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk pencarian alternatif. Program CBM yang mendukung masyarakat dengan alternatif pencaharian selalu gagal. Kegagalan alternatif pencaharian seperti budidaya rumput laut, Sisisk dan Lobster diakibatkan penggunaan alat tangkap bahan kimia (buis).

3. Konflik

Berbagai bentuk pengelolaan sumber daya laut Kawasan Taka Bonerate tentu saja mengakibatkan terjadinya konflik. Kepentingan yang bermacam-macam dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut oleh berbagai masyarakat nelayan juga semakin meningkatkan persaingan. Salah satu konflik yang terjadi adalah penggunaan alat tangkap pancing dengan menggunakan bom. Konflik terjadi secara tersembunyi, masyarakat nelayang

pancing menganggap bahwa mereka tidak dapat ikan karena pengaruh nelayan yang menggunakan bom. Semakin rumit dengan adanya aparat yang melindungi nelayan yang menggunakan alat tangkap secara illegal.

Hubungan nelayan dari luar Kawasan Taka Bonerate dengan nelayan lokal nampak kurang harmonis. Pengelolaan sumber daya laut mengenai wilayah bisa saja diperebutkan oleh nelayan dari luar. Dari segi alat tangkap tentu saja nelayan dari luar membawa alat yang cukup canggih yang dapat menguras sumber daya laut. Maka nelayan tradisional akan ketinggalan dan mendapatkan hasil yang sedikit.

Pihak aparat pemerintah sendiri saling mengklaim tentang batasan dan kewenangan terhadap wilayah kerja. Penanaman kasus yang saling klaim ingin menangani. Konflik antara penegak hukum akan terjadi walaupun tidak nampak. Baik itu aparat Bambimas, Babinsa, Jagawana dan Polair serta pemerintah setempat.

Hal diatas adalah segelintir permasalahan akibat pemanfaatan sumber daya laut yang kurang bijak dari berbagai pihak. Kompleksnya permasalahan harus ditangani langsung oleh Pemerintah Daerah dengan berbagai macam cara. Kebijakan yang tepat dan konkrit dalam penyelesaiannya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate perlu dilakukan pengelolaan secara berkelanjutan (*sustainable*). Kondisi alam yang begitu memperhatikan akan kelangsungan ekosistem terumbu karang setiap hari mengalami kerusakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Sebagai salah satu sumber daya alam yang perlu perhatian serius dari semua kalangan melalui pendekatan partisipasi masyarakat sendiri. Namun, tidak terlepas dari keterlibatan institusi atau lembaga masyarakat, pemerintah, dan pihak pemerhati lingkungan dan masyarakat.

1. Merujuk kebelakang pernah ada institusi tradisional yang mempunyai manajemen pengelolaan yang ramah lingkungan. Institusi tradisional tersebut adalah Panglima Menteng yang mengatur segala pengelolaan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate sangat efektif pada masa itu. Kemudian timbul punggawa laut dan punggawa lolo akibat pengaruh dari nelayan atau pedagang luar. Punggawa laut dan punggawa lolo sebagai institusi mengalami pergeseran dengan adanya faktor ekonomi dan tuntutan hidup sehingga muncul institusi lokal baru yang cenderung berfokus pada kegiatan ekonomi pasar . institusi yang masih

bertahan sampai sekarang yakni punggawa dan sawi. Punggawa-sawi lebih dipengaruhi oleh sistem ekonomi koperasi.

2. Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan terus melakukan perbaikan dalam mengelola Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Usaha pemerintah dengan melakukan segala upaya termasuk mengganti SK Menteri Kehutanan No 185/Kpts-II/1997 tanggal 31 Maret 1997 dengan mengeluarkan SK Menteri Kehutanan No. 6186/Kpts-II/2002 menjadi Balai Taman Nasional Tipe C yakni tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional.
3. Dalam pelaksanaannya Balai Taman Nasional Taka Bonerate melakukan sistem pengelolaan dengan membagi zona-zona. Pembagian zona yakni zona inti, zona Pemanfaatan dan Intensif serta zona cadangan.
4. Pemerhati lingkungan ikut serta memikirkan bentuk dari pengelolaan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Melalui bantuan dana Bank Dunia membentuk Program COREMAP. Program COREMAP pada fase I lebih berfokus pada Monitoring, controlling, surveillance (MCS). Kemudian dilanjutkan pada fase II yang berfokus pada pembangunan kesadaran masyarakat (*Community Developmen*).

5. Selain itu ada pula LP3M yang Program khusus pada *Community Based Management*. Program pendampingan masyarakat lokal dalam mencari mata pencaharian alternatif.
6. Pengelolaan sumber daya laut di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate tidak terlepas dari bentuk, cara, biota apa yang di tangkap oleh para nelayan lokal. Nelayan lokal dalam memanfaatkan sumber daya laut di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate seperti nelayan pancing, nelayan jaring/pukat, nelayan bubu', nelayan bius dan bom. Bentuk, cara, dan jenis tangkapan nelayan ini ada yang dapat mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ada pula yang ramah lingkungan.
7. Nelayan lokal sebenarnya sadar akan akibat dari penggunaan alat tangkap. Namun, himpitan ekonomi dan persaingan penangkapan sumber daya laut sangat tidak adil. Persaingan antara nelayan lokal dan nelayan pendatang yang lebih merugikan nelayan lokal. Nelayan pendatang berasal dari berbagai daerah yang mempunyai akses atau dianggap dekat dengan Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Mereka berasal dari Kabupaten Sinjai, Bulukumba, Jeneponto, Bantaeng, Pangkep dan Nelayan dari Kota Makassar, serta dari Propinsi Lain seperti NTT, Bali, dan Buton (Sulawesi Tenggara). Akibat dari ketidakadilan ini nelayan lokal cemburu dengan nelayan pendatang yang dapat menimbulkan konflik.

8. Dampak dari pengelolaan sumber daya laut dapat mempengaruhi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat (Kemakmuran, Kemiskinan dan Konflik).

B. Saran

1. Semua komponen baik masyarakat, pengambil kebijakan, penegak hukum duduk bersama menyamakan persepsi arti sebuah terumbu karang.
2. Mengkaji ulang permasalahan yang ada berdasarkan pengetahuan lokal, yang kemudian dirumuskan berdasarkan persepsi masyarakat tersebut, kemudian mendampingi masyarakat untuk menjalankan program, mengontrol, mengawasi, evaluasi melibatkan masyarakat itu sendiri.
3. Adanya jaminan bagi penegak hukum yang konkrit sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang akhirnya mengakibatkan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alder, Jackie & Cristanty, 2005., *Tapak-Tapak Waktu Kebudayaan, Sejarah, dan Kehidupan Sosial di Sulawesi Selatan : Taka Bonerate Membangun Strategi Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Masyarakat*. Inninawa, Makassar
- Arikunto, Suharsini, 1995., *Prosedur Penelitian : suatu Pendekatan Praktik*. Bina Aksara Yogyakarta.
- Baso, Aris, 2004., *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Ikan Terbang (cypsilurus spp) Berkelanjutan Di Selat Makassar dan Laut Flores*. Disertasi Pascasarjan-Universitas Hasanuddin.
- Brannen, Julia. 1999., *Memandu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Cetakan II, April 1995, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Budianty, 2006., *Potensi Komunitas dalam Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang (Menilik kasus Pulau Tombolongan, Sulawesi Selatan)*. Jurnal INOVASI Vol. 6/XVIII/Maret/2006, IPB, Bogor.
- Budiharsono S., 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Pradnya Paramita. Jakarta. 159p.
- Cristenson, J.A. & J.W. Robinson, JR. 1994., *Community Development in Persepective*. Ames : Iowa State University Press.
- Dahuri, Rahim, dkk. 2001., *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Faisal, Sanapiah, 1995., *Format-Format Penelitian Sosial : Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Cetakan III, Agustus, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta.
- Hidayat, Nur & Soeparno W.Ir.MSc. 2002., *Pengembangan Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri Berbasis Pembangunan Kehutanan*. <http://www.dephut.go.id/INFORMASI/PUSLUH/KMPM.htm>. di akses tanggal 6 Februari 2006.
- Husain, Fahmi. 2004., *Pandangan Staekholders Perkenaan dengan Pemanfaatan dan Pengelolaan Taman Nasional Taka Bonerate*. Skripsi Antropologi Fisip-Unhas, Makassar.
- ISSET (Institute For Selayar Studies, Empowerment, and Transformation) TIM 2004., *Peluang dan Tantangan Menuju Kabupaten Maritim (Study Tentang Pola Budaya Masyarakat Pesisir di Kabupaten Selayar)*. Laporan Hasil Penelitian, Benteng Selayar.
- Indra, Zulfinas. 2006., *Eksistensi Kelembagaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Taman Nasional Taka Bonerate*. Thesis Pascasarjan Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Jawayaputra, Achmadi. 2005., *Informasi Kajian Pemasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial : Kendala Perkembangan Potensi Masyarakat (Study Kasus di kelurahan Kawatuna, Kota Palu)*. Volume 10, No.1 April

- 2005, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial (P3KS), Badan Pelatihan Dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Jakarta.
- Kalangi, Nico S. 1994., *Kebudayaan dan Kesehatan Pengembangan Pelayanan Primer Melalui Pendekatan Sosial Budaya*. Megapoin, Jakarta.
- Koendjaraningrat. 1977., *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta.
- Lampe, Munsu & Arifin, Ansar, 2004., *Tinjauan Sosial Budaya Terhadap Fenomena Konflik Kepentingan Antar Kelompok-Kelompok Stakeholders Sumber Daya Laut Kawasan Taka Bonerate dan Pulau Sembilan*. Laporan Hasil Penelitian Pelaksanaan Penelitian Hibah, Penelitian Program SP-4, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Latama, Gunarto. 2002., *Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Indonesia*. Program Pascasarjana IPB, Filsafat Sains, Bogor.
- Leibner David. 2005., *Tapak-Tapak Waktu Kebudayaan, Sejarah, dan Kehidupan Sosial di Sulawesi Selatan : Empat versi Lisan Cerita Leluhur Orang Bajo di Selayar Selatan*. Inninawa, Makassar.
- Lobja, Erick. 2003., *Menyelamatkan Hutan dan Hak Adat Masyarakat Kei : Tinjauan Terhadap Praktek Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Hutan oleh Masyarakat Tradisional Kei*. Debut Press, Yogyakarta.
- Mattulada. 1983., *Manajemen Tradisional dalam Kalangan Usahawan Orang Bugis-Makassar*. Majalah LONTARA Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Report, Brundtland. 1987., *Center For Environmental Law, Justice and Community Based Marine and Coastal Resources : Apakah arti berbasis Masyarakat (community based) ?*. <http://www.unsrat.ac.id/hukum/pesisir/index.htm>. di akses tanggal 1 Maret 2006.
- Safitri, Myma. 1995., *Hak dan Akses Masyarakat Lokal pada Sumber Daya Hutan (Kajian Peraturan Perundang-undangan Indonesia)*. Jurnal EKOLOGI, Forum Penelitian dan Pengembangan Antropologi Ekologi, Program study Antropologi-Pascasarjana, Unhas, Makassar.
- Salaman, Darmawan. 2004., *Community Development untuk Pengelolaan Sosial Forestry di Indonesia*. Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sallatang, Arifin ; Lampe, Munsu & Tang Mahmud.2002.,*Rano Sosial Budaya dalam Pokok-Pokok Pikiran Pembangunan Kelautan Indonesia*. Unhas, Makassar.
- Sani, M Yamin. 2000., *Manusia Kebudayaan dan Pembangunan : Community Development dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal*. Laboratorium Pembangunan Masyarakat, Program Pascasarjana, Univeritas Hasanuddin, Makassar.

- Satria, Arif. 2004., *Paradigma Perikanan Berkelanjutan*. Diakses pada tanggal 11 Maret 2006 di <http://www.republika.co.id/ASP/kolom.asp?>.
- Soemarwoto, Otto. 1999., *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan, Jakarta.
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliet. 2003., *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teorisasi Data*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Syahyuti. 2005., *Pembangunan Pertanian dengan Pendekatan Komunitas (Kasus Rancangan Program Prima Tani)*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 23 No. 2. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Tickson, Deddy T. 2001., *Implementasi Otonomi dalam Pembangunan Kabupaten*. Modul Mata Kuliah Jurusan Administrasi Pembangunan, Proram Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Topatimasang, Roem. 2005., *Pelestarian Lingkungan Penanggulangan Kemiskinan : Tradisional Wisdom, social capital*. Diakses tanggal 11 maret 2006. <http://www.smure.or.id/newslet/2005/ed15>.
- Winarto, Yunita T & Suhadiyanto, Totok & Choesin, Ezra M. 2004., *Karya Tulis Ilmiah Sosial : Menyiapkan, Manusia, dan Mencermatinya*. Yayasan Obor, Jakarta.

Dokumen :

Harian Fajar, tanggal 22 Desember 2005., *Mendung di Desa Tambolongan (1) : Trauma Warga Desa Mengungsi.* On line .
<http://www.fajar.co.id/news.php?news.id=14482>. diakses tanggal 11 Maret 2006.

Harian Fajar, tanggal 23 Desember 2005., *Mendung di Desa Tambolongan (2) : Saat Tertembak, Mudayang Berteriak 'Allahu Akbar'.* On line .
<http://www.fajar.co.id/news.php?news.id=14540>. diakses tanggal 11 Maret 2006.

Harian Fajar, tanggal 24 Desember 2005., *Mendung di Desa Tambolongan (3) : Anti Bom dan Bius yang berakhir Maut.* On line .
<http://www.fajar.co.id/news.php?news.id=14582>. diakses tanggal 11 Maret 2006.

Suara Pembaharuan, tanggal 12 Desember 2005., *Keluarga Tragedi Tambolongan Tiba di Jakarta.* On Line Diakses tanggal 11 maret 2006.
<http://www.suara.pembaharuan.com/news/2005/12/12/>.